

Pendidikan Politik Generasi Muda di Era Disrupsi
Studi Kasus : DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta

Skripsi

Program Sarjana S1

Jurusan Ilmu Politik



Nama : Bagas Pangestu Putra

NIM : 1806016052

PROGRAM STUDI S1 ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022

SKRIPSI
PENDIDIKAN POLITIK GENERASI MUDA DI ERA DISRUPSI
STUDI KASUS : DPW PARTAI AMANAT NASIONAL DKI JAKARTA

Disusun Oleh:
Bagas Pangestu Putra
1806016052

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi pada tanggal 22 Desember 2022 dan dinyatakan lulus.

Susunan Dewan Penguji

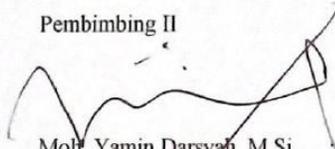


Penguji I



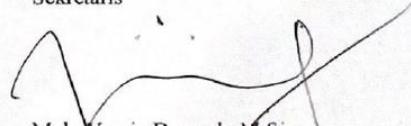
Masrohatun, M.Si
NIP. 198806212018012001

Pembimbing II



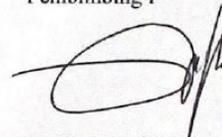
Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

Sekretaris



Moh. Yamin Darsyah, M.Si
NIP. 198409092019031007

Pembimbing I



Solkhah Mufrikhah, M.Si
NIP. 198505102016012901

NOTA PEMBIMBING

Lamp : -

Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan
Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
UIN Walisongo Semarang
Di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya. Maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Bagas Pangestu Putra
NIM : 1806016052
Jurusan : Ilmu Politik
Judul Skripsi : Pendidikan Politik Generasi Muda di Era Disrupsi:
Kasus DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alailum Wr.Wb.

Semarang, 12 Desember 2022

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi & Tata Tulis

Solkah Mufrikhah, M.Si.

198505102016012901

Moh. Yamin Darsyah, M.Si

198409092019031007

LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan, maupun yang belum diterbitkan, sumbernya dijelaskan dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 12 Desember 2022

Bagas Pangestu Putra
1806016052

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas ridho dan karuniannya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Pendidikan Politik Generasi Muda di Era Disrupsi: Studi Kasus DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta” . Sholawat serta salam tidak lupa kita hantarkan kepada baginda nabi agung SAW yang senantiasa menjadi inspirasi dan teladan terbaik bagi kita semua.

Perjalanan panjang yang penulis telah lalui dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, yang membutuhkan sebuah kegigihan dan kesabaran untuk menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari secara penuh bahwa banyak pihak yang terlibat memberikan bantuan, dukungan, dan bimbingan selama menyelesaikan studi dan skripsi ini.

Oleh karena itu penulis haturkan ucapan terima kasih kepada :

1. Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. Imam Taufiq, M.Ag yang telah emmebrikan kesempatan kepada saya untuk bisa melanjutkan pendidikan dan menyelesaikan studi di Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Ibu Dr. Misbah Zulfa Elizabeth, M.Hum
3. Kepala Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang , Bapak Syamsudin,M.Ag yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan penyusunan dan penulisan skripsi ini.
4. Sekretaris Jurusan Ilmu Politik FISIP UIN Walisongo Semarang, Bapak Muhammad Mahsun M,A yang juga telah memberikan dukungan, bimbingan, dan serta motivasinnya dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Yamin Darsyah, M.Si selaku Dosen Pembimbing 1 dan Ibu Solkhah Mufrikhah, M.Si selaku Dosen Pembimbing 2 yang selalu memberikan bimbingan atas penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Gubernur DKI Jakarta 2019 Bapak Rasyid Anies Baswedan yang telah memberikan kesempatan, peluang, dan dukungan dalam segi financial pembayaran kuliah setiap semesternya hingga penulis selesai dalam studinya.
7. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ibu H. Zita Anjani, S.Sos yang telah memberikan kesempatan, peluang, dan dukungan dalam segi financial selama berkuliah dan memberi kesempatan peluang selama pengambilan data.
8. Menteri Perdagangan Bapak Zulkifli Hasan yang telah memberikan kesempatan, peluang, juga sebagai guru ilmu politik saya selama saya berkuliah hingga saat ini.
9. Segenap jajaran dosen FISIP UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmu serta bimbingan sehingga penulis dapat mengimplementasikan ilmu yang diberikannya ke dalam penyusunan serta penyelesaian penulisan skripsi yang telah dilakukan.
10. Segenap jajaran tenaga pendidik dan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Walisongo Semarang yang telah membantu melancarkan segala keperluan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Bapak Joko Purwanto dan Ibu Dewi Yuniastuti, selaku orang tua yang sangat penulis cintai dan sayangi, yang telah merawat dan mendidik dengan penuh cinta kasihnya, sehingga penulis tetap semangat untuk terus mengapai cita-cita agar menjadi anak yang berbakti dan atas do'a yang tak pernah henti, menjadikan penulis merasa selalu dimudahkan jalannya dalam menghadapi rintangan. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, maghfiroh dan hidayahnya di dunia dan akhirat kepada beliau, kedua orang tua penulis.
12. Sahabat penulis yang tidak bisa saya sebutkan satu – persatu yang telah memberi dukungan moral dalam progress pengerjaan skripsi saya.

13. Jajaran Rocket Organizer, GPS Transport dan Rocket Tour & Travel yang telah mendampingi perjalanan bisnis dan memberi dukungan operasional selama pengerjaan skripsi berjalan hingga selesai.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya, namun peneliti berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi peneliti sendiri dan para pembaca pada umumnya.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirohim

Dengan mengucapkan segala syukur kepada Allah SWT Tuhan Semesta Alam

*Saya persembahkan sebuah karya ini untuk Kedua orang tua saya Bapak
Joko Purwanto dan Ibu Dewi Yuniastuti yang telah memberikan seluruh doa
dan*

dukungan serta menyertai saya dalam setiap langkah kehidupan

*Untuk kedua dosen pembimbing sekaligus mentor saya, Ibu Solkhah
Mufrikhah, M.Si. dan bapak Moh. Yamin Darsyah, M.Si. yang telah
memberikan segala ilmu dan bimbinganya serta motivasi terbesar agar bisa
menjadi dua orang hebat seperti beliau berdua.*

*Dan untuk Almamater tercinta UIN Walisongo Semarang, Fakultas Ilmu
Sosial*

*dan Ilmu Politik prodi Ilmu Politik yang menjadi tempat bagi saya untuk
menorehkan sepercik tinta sejarah dan pijakan awal kesuksesan saya di masa
depan*

MOTTO

**"SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH NASIB SUATU
KAUM SEHINGGA MEREKA MENGUBAH KEADAAN PADA DIRI
MEREKA." (Q.S Ar-Ra'd: 11)**

ABSTRAK

Konotasi pendidikan politik di Indonesia dikategorikan buruk oleh masyarakat karena dalam realisasinya masih ditemukan partai yang hanya melakukan pendidikan politik sebatas musiman karena dilakukan saat mendekati pesta demokrasi, actor politik juga tidak mengedukasi secara menyeluruh dan mereka hanya mementingkan diri sendiri untuk promosi visi dan menarik hati masyarakat guna mendapat dukungan dalam proses pemilihan. Oleh karena itu perlu adanya revolusi pendidikan politik seperti yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dimana tidak hanya sebatas promosi visi dan misi actor politik namun lebih mendalami bagaimana politik bekerja mulai dari pengenalan politik, ideologi politik, sistem dan mekanisme politik. Fokus penelitian dalam skripsi ini ialah melihat bagaimana Partai PAN memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat khususnya generasi muda saat era disrupsi serta dampak kegiatan pendidikan politik yang diberikan Partai PAN terhadap masyarakat.

Dalam penelitian ini ditulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna mendapatkan informasi secara mendalam dan komprehensif dari pendidikan politik yang diterapkan. Pada penelitian ini menggunakan dua teori yakni, Partai Politik yang diutarakan oleh Ramlan Surbakti dan teori kedua ialah teori Pendidikan Politik yang diutarakan oleh Dr. Kartini Kartono. Penggunaan metode dan teori yang dipilih penulis untuk menggali dan menganalisis hasil temuan secara mendalam dan komprehensif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Politik yang dilakukan oleh Partai PAN sudah terealisasi dengan prosedur yang ada hal ini dibuktikan dengan adanya DPW Partai PAN memfasilitasi program dengan nama Sekolah Politik Amanat Nasional. Dimana materi yang diberikan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat secara sistematis dan terstruktur. Selain itu manfaat lainnya berupa hiburan seperti hadiah doorprize, hiburan music, hiburan games dan sebagainya. Oleh karena itu

pendidikan politik memiliki peran yang strategis tidak hanya sebagai media kampanye namun bisa menjadi alat edukasi politik terhadap masyarakat khususnya edukasi politik secara umum.

Kata Kunci: Partai Politik, Pendidikan Politik

ABSTRACT

The connotation of political education in Indonesia is categorized as bad by the public because, in reality, there are still parties that only carry out political education seasonally because it is carried out when approaching a democratic party; political actors also do not educate thoroughly, and they are only concerned with themselves to promote visions and attract people's attention. receive support in the selection process. Therefore, there is a need for a revolution in political education such as that carried out by the National Mandate Party, which is not only limited to promoting the vision and mission of political actors but also explores more deeply how politics works, starting with the introduction of politics, political ideology, political systems, and mechanisms. The focus of research in this thesis is to see how the PAN Party provides political education to the community, especially the younger generation during the era of disruption and the impact of political education activities provided by the PAN Party on society.

This research was written using qualitative research methods with a case study approach in order to obtain in-depth and comprehensive information from the applied political education. In this study, two theories were used, namely, political parties expressed by Prof. Miriam Budiardjo (2008) and the second theory is the theory of Political Education put forward by Dr. Kartini Kartono (2009). The use of methods and theories chosen by the author to explore and analyze the findings in depth and comprehensively.

The results of this study indicate that the political education carried out by the PAN Party has been realized with the existing procedures. This is evidenced by the existence of the PAN Party DPW, which facilitates a program called the National Mandate Political School. where the material provided is adapted to the needs of society in a systematic and structured manner. Besides that, other benefits are in the

form of entertainment, such as Doolally prizes, music entertainment, gaming entertainment, and so on. Therefore, political education has a strategic role, not only as a media campaign but also as a political education tool for the public in general.

Keywords: Political Parties, Political Education

DAFTAR ISI

NOTA PEMBIMBING	3
LEMBAR PERNYATAAN SKRIPSI	4
KATA PENGANTAR.....	5
PERSEMBAHAN	8
MOTTO	9
ABSTRAK	10
ABSTRACT	12
DAFTAR ISI.....	14
DAFTAR GAMBAR.....	17
BAB I.....	18
PENDAHULUAN	18
A. Latar Belakang	18
B. Rumusan Masalah	23
C. Tujuan Penelitian	23
D. Manfaat Penelitian	24
E. Kajian Pustaka.....	24
F. Metode Penelitian.....	29
G. Teknik Pengumpulan Data.....	31
H. Teknik Analisis Data.....	33
I. Sistematika Penulisan	34
BAB II	36
PENDIDIKAN POLITIK SEBAGAI SEBUAH STRATEGI LITERASI POLITIK Error! Bookmark not defined.	
A. Partai Politik dan Pendidikan Politik	36
1.1 Partai Politik	36
1.2 Pendidikan Politik.....	38
B. Pendidikan Politik Sebagai Sebuah Strategi literasi Politik.. Error! Bookmark not defined.	
2.1 Strategi Politik	Error! Bookmark not defined.

2.2 Strategi Literasi Politik	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....	43
GAMBARAN UMUM PARTAI AMANAT NASIONAL	43
A. Sejarah Partai Amanat Nasional.....	43
B. Visi dan Misi Partai Amanat Nasional.....	45
C. Struktural Pengurus DPW PAN DKI Jakarta.....	46
Gambar 1 Pengurus DPW PAN DKI Jakarta	47
.....	50
Gambar 2 Structural DPW BM PAN DKI Jakarta.....	50
BAB IV.....	51
PERAN SERTA PENDIDIKAN POLITIK DPW PARTAI AMANAT NASIONAL DKI JAKARTA	51
1. Program Pendidikan Politik DPW PAN DKI Jakarta	51
Gambar 3 Sumber : Grup Whatsapp Sekolah Politik AI.....	64
Gambar 4 Sumber : dari Zoom pada saat berlangsung kelas bersama Bapak Zulkifli Hasan	69
Gambar 5 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	69
Gambar 6 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	71
Gambar 7 Sumber : Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	73
Gambar 8 Sumber : Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	75
Gambar 9 Sumber: Dokumentasi Sekolah Politik Amanat Nasional	77
Gambar 10 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	80
BAB V	84
DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK SEKOLAH AMANAT NASIONAL	84
A. Keuntungan Mengikuti Program Sekolah Politik Amanat Nasional	Error! Bookmark not defined.
Gambar 11 Sumber : email sekolah politik amanat institute..	Error! Bookmark not defined.

B. Manfaat Pasca Sekolah Politik Dalam Internal Partai Politik **Error! Bookmark not defined.**

BAB VI PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Kritik dan Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	93
LAMPIRAN.....	98
A. Dokumentasi Penelitian	98

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Pengurus DPW PAN DKI Jakarta	47
Gambar 2 Structural DPW BM PAN DKI Jakarta.....	50
Gambar 3 Sumber : Grup Whatsapp Sekolah Politik AI.....	64
Gambar 4 Sumber : dari Zoom pada saat berlangsung kelas bersama Bapak Zulkifli Hasan	69
Gambar 5 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	69
Gambar 6 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	71
Gambar 7 Sumber : Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	73
Gambar 8 Sumber : Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	75
Gambar 9 Sumber: Dokumentasi Sekolah Politik Amanat Nasional.....	77
Gambar 10 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional	80
Gambar 11 Sumber : email sekolah politik amanat institute..	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan politik ialah prosedur pengajaran untuk masyarakat selaku warga negara. Mulai dini, kita sudah diserahkan pendidikan mengenai maksud bernilai politik itu sendiri baik dari pelajaran di sekolah ataupun dalam area keluarga. Sebab dalam dasarnya, uraian mengenai politik tidak hanya tentang memilah calon A ataupun B tetapi politik memiliki maksud yang amat besar serta banyak maknanya untuk kehidupan warga. (Daud, 2019).

Banyak orang saat ini tidak menyadari politik pendidikan, dengan keyakinan luas bahwa politik adalah sesuatu yang hanya diperhatikan oleh pemerintah dan segelintir elit. Ketidaktertarikan ini memiliki konsekuensi dunia nyata: banyak pemilih yang ditipu oleh propaganda selama pemilihan karena mereka tidak mau repot-repot mempelajari platform dari berbagai kandidat, meskipun BPS (Badan Pusat Statistik) memperkirakan bahwa Indonesia akan meraup bonus demografi antara 2030 dan 2040. Maksudnya, antara sekarang dan nanti, golongan umur produktif Indonesia (umur 15- 64) akan melampaui golongan umur non produktif. Sekurang- kurangnya 64 Persen dari penafsiran keseluruhan populasi 297 juta orang, menurut BPS, akan berumur produktif. (Echo, 2022).

Ketika lebih banyak orang memasuki usia produktif relatif terhadap penduduk di usia non-produktif, bonus demografi terjadi. Usia 15 hingga 64 tahun termasuk dalam rentang usia produktif yang relevan. Pada tahun 2045-2065, penduduk usia kerja Indonesia (didefinisikan sebagai mereka yang berusia antara 15 dan 64 tahun) akan mencapai hampir 70% dari total penduduk. Dibandingkan dengan Jepang yang penduduknya diproyeksikan akan menua secara signifikan dalam beberapa dekade mendatang, hal ini

merupakan keuntungan yang signifikan bagi Indonesia. Sejauh ini benar, seharusnya Indonesia lebih produktif dari Jepang. Indonesia saat ini memiliki tingkat partisipasi politik yang sangat tinggi yang harus dapat diisi oleh generasi milenial (Echo, 2022).

Fakta bahwa begitu banyak warga negara tetap tidak menyadari hak dan kewajiban politik mereka dan tidak yakin di mana mereka berdiri sebagai individu dalam sistem politik merupakan tema yang berulang dalam evolusi politik. Baik negara maupun partai politik memandang masyarakat semata-mata melalui lensa kepentingan mereka sendiri, dan menggunakan masyarakat semata-mata sebagai sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Artinya, agenda partisan atau individu lebih diutamakan dari pada kepentingan publik. Satu-satunya cara bagi partai politik, khususnya, untuk memperbaiki kehidupan warga negara pada umumnya adalah dengan menanamkan prinsip-prinsip politik kepada masyarakat dengan mendidik mereka tentang politik (Fadjar, 2012)

Tabel I.A.1 Data Kursi DPRD DKI Jakarta Tahun 2019 – 2024

No	Partai Politik	Jumlah Kursi
1	PDI Perjuangan	25 Kursi
2	Gerindra	19 Kursi
3	PKS	16 Kursi
4	Demokrat	10 Kursi
5	PAN	9 Kursi
6	PSI	8 Kursi
7	NasDem	7 Kursi
8	Golkar	6 Kursi
9	PKB	5 Kursi
10	PPP	1 Kursi
	JUMLAH	106 KURSI

Sumber : dprd-dkijakartaprov.go.id

Dari data kursi DPRD DKI Jakarta dijelaskan bahwa dari 10 partai politik yang bertarung dalam pemilu 2019-2021, Partai Amanat Nasional berada di urutan menengah nomor 5, yaitu 2 peringkat dibawah PKS yang sama – sama memiliki kedudukan sebagai partai berbasis Islam perkotaan. Oleh karena itu, untuk bisa menyeimbangi PKS, PAN harus memiliki strategi khusus di masa bonus demografi ini dengan merangkul para pemilih pemula untuk bisa menyeimbangi kedudukan PKS melalui pendidikan politik.

Penelitian mengenai Pendidikan Politik pernah dikaji sebelumnya. Beberapa penelitian tersebut diantaranya ialah **Pertama**, dalam artikel jurnal yang berjudul “Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat” yang ditulis (Wijaya, I Gede dan Suryani, 2020). Menurut temuannya, program pendidikan untuk partai politik dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, tidak terbatas pada “seminar, lokakarya, pelatihan, pendampingan, pelatihan, bimbingan teknis, pertunjukan seni, dokumenter, komposisi, dan bentuk media lainnya”. Kurangnya pendidikan politik publik oleh partai politik berpotensi menurunkan partisipasi pemilih dalam pemilihan umum, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kesan kondisi politik yang tidak sehat dan menyebabkan tingginya angka apatisme dan nonpartisipasi pemilih.

Kedua, artikel jurnal serupa dengan judul “Pengembangan Model Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik Guna Mengantisipasi Perilaku Golput di Kota Padang” (Aina, Rafni, Adnan, 2015) Mahasiswa Ilmu Politik. Studinya menguraikan proses penciptaan model pendidikan politik yang direvisi untuk pemuda saat ini, yang menggabungkan berbagai pendekatan, sumber daya, dan metodologi baru. Seberapa siap partai merancang, melaksanakan, dan menilai semua program pendidikan politik bagi generasi muda partai merupakan sumber strategi yang muncul dari dalam

partai. Sementara itu, taktik yang digunakan oleh aktor non-negara (NPA) seperti pemerintah daerah (Kesbangpolinmas) dan LSM, serta pusat kelembagaan seperti universitas, merupakan hasil dari upaya kolaboratif antara mereka dan pemangku kepentingan lainnya.

Dari adanya hal tersebut, maka partai politik hendaknya merencanakan sejak awal program-program Pendidikan politik sekaligus melakukan evaluasi terus menerus, efektivitas, pelaksanaan program pendidikan politik baik bagi generasi muda kader partai maupun non kader. Partai politik juga harus membangun kerjasama dengan institusi pendidikan untuk terus menerus memperbaiki program pembelajaran pendidikan politik agar nuansa pendidikan dari proses pendidikan politik lebih menonjol ketimbang hanya melaksanakan kegiatan untuk sekedar formalitas saja.

Dengan adanya media yang serba digitalisasi aktivitas politik seperti melakukan pendidikan politik terhadap kader dan seluruh masyarakat dapat dilakukan dengan cara lebih akuntabilitas, dan transparan. Seperti yang kita ketahui bahwa penyebaran pendidikan politik yang dilakukan oleh parpol saat ini masih sebatas pendidikan musiman saja, dilakukan menjelang kompetisi Pemilu, seluruh partai politik asik dalam memainkan perannya sebagai aktor yang mengedukasi masyarakat secara langsung, namun dalam prakteknya edukasi yang dilakukan oleh para aktor politik tersebut hanya sebatas *framing* untuk mengambil hati para masyarakat khususnya generasi muda yang pada saat ini jumlahnya sedang mendominasi. Semakin maraknya pengguna internet di Indonesia pada saat ini menjadikan internet sebagai bagian utuh dari saluran penting dalam *promotion mix* para kadidat (Heryanto, 2018).

Hal tersebut tidak terkecuali dilakukan oleh Partai Amanat Nasional dalam melakukan pendidikan politik. Sudah seharusnya langkah yang diambil oleh Partai Amanat Nasional dalam melakukan pendidikan politik dilakukan bukan hanya pada saat perhelatan pesta demokrasi yang berisikan promosi visi

dan misi para kandidatnya, masyarakat khususnya generasi millennial harusnya menerima pendidikan politik terkait pengenalan terhadap partai politik, penanaman dasar tentang ideologi, berbangsa dan bernegara, sistem pemilu beserta peraturan yang tertera dalam penyelenggaraan pemilu, hak dan kewajiban yang harus di terima oleh warga negara, hak asasi manusia (HAM) dan sistem demokrasi negara (Surbakti, 1992).

Pada kegiatan ini diisi oleh beberapa rangkaian acara menarik yang dinilai akan menjadi daya tarik pembelajaran, supaya para peserta tidak bosan dan jenuh dengan rangkaian selama sekolah politik diadakan dan akan menimbulkan perspektif bahwa politik adalah dunia yang seru dan asik jika dilakukan dengan senang hati. Pada rangkaian sekolah politik juga diwarnai dengan berbagai hadiah dan giveaway untuk para peserta, namun tidak diberikan dengan Cuma – Cuma, melainkan dengan membuat beberapa tugas yang diberikan dan dipilih karya yang paling menarik untuk dibahas dan juga diisi oleh beberapa tokoh – tokoh publik, tokoh politik hingga tokoh agama untuk mengisi rangkaian acara Sekolah Politik Amanat Nasional. Pada Sekolah Politik ini juga menguji hingga seberapa tajam dan seberapa kritis para pemikiran peserta – peserta SPAN selama mengikuti sekolah (Rahim, 2005).

Pendidikan Politik yang kedua adalah LKAD (Latihan Kader Amanat Dasar) kegiatan ini dibentuk atas dasar pelatihan seminar seluruh kader PAN dan pembentukan Badan Saksi Nasional, yaitu para saksi milenial yang telah menyatakan bahwa dirinya siap untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024 dan menjadi saksi pada tiap – tiap TPS yang mereka pilih pada tiap wilayahnya mewakili Partai Amanat Nasional.

Pada kegiatan ini dihadiri oleh seluruh Kader DPW PAN DKI Jakarta dan juga seluruh saksi milenial yang berada di wilayah DKI Jakarta. Partai Amanat Nasional memiliki paling sedikit 100 anggota milenial per kelurahan yang bertempat tinggal diseluruh wilayah DKI Jakarta, sehingga untuk mendapatkan saksi milenial, tiap – tiap kader PAN membawa perwakilan yang

akan menjadi saksi di tiap – tiap wilayah mereka, mulai dari tingkat kelurahan hingga tingkat RT. Partisipasi masyarakat diharapkan, tetapi tidak harus sebagai hasil dari mendengarkan suara mereka yang telah mengubah nasib selama beberapa dekade. Oleh karena itu, Partai Amanat Nasional hadir di masyarakat untuk memenuhi kewajibannya memberikan pendidikan politik agar masyarakat dapat lebih berkontribusi dan mempengaruhi kinerja partai (Prihatmoko, 2005).

Berdasarkan uraian – uraian diatas, dapat diketahui bahwa Partai Amanat Nasional telah berhasil melaksanakan pendidikan politik dengan beberapa kegiatan – kegiatan Pendidikan Politiknya pada tahun 2020 – 2021, hal tersebut dapat dilihat dari seberapa aktifnya para peserta dalam mengikuti dua rangkaian kegiatan tersebut, diantara peserta saling berlomba – lomba untuk mengikuti acara – acara berhadiah yang diikuti dengan beberapa kriteria dan persyaratan sesuai dengan tugas – tugas yang diberikan. Partai Amanat Nasional juga dinilai berhasil dalam menghimpun para milenial – milenial DKI Jakarta sehingga Partai Amanat Nasional dapat mengumpulkan banyak saksi milenial yang menyatakan dirinya siap untuk berpartisipasi dalam berbagai acara Partai Amanat Nasional yang sehubungan dengan Pemilu 2024.

B. Rumusan Masalah

Berikut adalah spesifikasi dari rumusan masalah :

1. Bagaimana Partai Amanat Nasional berperan dalam melakukan pendidikan politik terhadap generasi muda pada era disrupsi?
2. Bagaimana dampak dari kegiatan Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang peran partai politik dalam melakukan pendidikan politik terhadap generasi milenial di era digitalisasi: studi kasus DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta memiliki tujuan:

1. Untuk mengetahui lebih luas dan mendalam praktik pendidikan politik yang dilakukan oleh partai amanat nasional dalam memanfaatkan era digitalisasi pada saat ini.
2. Mendeskripsikan bagaimana Partai Amanat Nasional berperan dalam memberikan pendidikan politik untuk masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis dan praktis dari penulisan skripsi ini keduanya dapat diringkas menjadi:

1. Secara Teoritik
 - a. Penelitian ini berguna untuk memperluas dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang Peran Partai Politik dalam Melakukan Pendidikan Politik Terhadap Generasi Muda di Era Disrupsi
2. Secara Praktis
 - a. Berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan politik khususnya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan model pendidikan politik oleh partai politik sebagai tanggung jawab partai politik kepada masyarakat.
 - b. Pada akhirnya, masyarakat akan lebih banyak terlibat dalam kegiatan politik, seperti mengikuti pemilu atau bahkan menjadi kader politik, sebagai hasil dari pemahaman dan penghargaan masyarakat terhadap hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Partai dari partai politik.

E. Kajian Pustaka

Kajian mengenai pendidikan politik ini telah dilakukan juga oleh beberapa penulis terdahulu lainnya. Hasil penelusuran penulis kajian pustaka akan dibagi menjadi 2 pembahasan, yaitu pertama mengenai pendidikan politik generasi muda dan era disrupsi.

1. Pendidikan Politik Generasi Muda

Kajian ini akan bersumber dari tulisan beberapa penulis dengan topik kajian mengenai pendidikan politik generasi muda. Artikel jurnal pertama adalah artikel yang ditulis oleh Yulianto Dwi Saputro (2019) dengan judul *“Peran Partai Politik Generasi Muda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD II Partai Golkar Malang, Jawa Timur)”*. Penelitian pada jurnal ini ditulis dengan arti membagikan uraian mengenai kedudukan Partai Golkar dalam melakukan kewajiban serta fungsi partai politik di aspek pendidikan politik di kota Malang yang dapat dikatakan memiliki tingkatan pemahaman yang kecil.

Fokus yang dibentuk pada penelitian ini merupakan rendahnya tingkatan kesertaan politik di Kota Malang serta kurang berhasilnya penerapan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Partai Golkar Kota Malang. Dalam perihal ini penulis beropini jika hal itu dapat diakibatkan oleh sebab materi yang disajikan kurang menarik serta abstrak, akibatnya aktivitas tidak bisa berjalan dengan efisien. Akhirnya, partisipasi partai politik untuk menaikkan pemahaman khalayak akan tanggung jawab serta haknya selaku masyarakat negeri yang bertanggung jawab tidak menggapai kemampuan penuhnya.

Penelitian yang ditulis oleh Riyan Feriyanto Efendi (2019) berjudul *“Peran Partai Politik Generasi Muda dan Implikasinya terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi di DPD II Partai Golkar Malang, Jawa Timur)”* dan penelitian yang ditulis oleh Kamaluddin (2019) dalam skripsi berjudul *“Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat Desa Labuja, Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros”*.

Kedua riset ini mengutip fokus hubungan antara pendidikan politik serta kesertaan politik, yakni kesesuaian dalam rendahnya tingkatan kesertaan

kepada politik. Pada hal ini penulis berargumen hal itu dapat saja terjalin sebab warga itu kurang mempunyai uraian mengenai hak serta kewajibannya selaku warga negara. Riset awal ini dicoba dengan latar belakang sedikitnya partisipasi warga Kecamatan Waru sewaktu penentuan Bupati Sidoarjo tahun 2015. Terpaut perihal ini penulis mempunyai argument jika hal itu dapat diakibatkan oleh minimnya pemasyarakatan kepada penentuan Bupati Sidoarjo, program kampanye tidak hingga ke area Kecamatan Waru, tetapi hal itu pula tidak bebas dari rendahnya wawasan warga kepada kesertaan politik tercantum rendahnya pemahaman orang buat ber partisipasi.

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Lutter Aristino (2017) yang berjudul *“Peran Partai Politik di dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Rangka Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Inisiatif Masyarakat dalam Proses Pemilu di Kota Semarang”* dan skripsi yang ditulis oleh Halimur Rosyid (2019) yang berjudul *“Pendidikan Politik oleh DPD Partai Gerindra Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2019”*. Kedua fokus penelitian ini mengkaji peran serta hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam menghadapi Pemilu. Dalam penelitian pertama paling tidak, Partai Demokrat, Gerindra, dan Golkar disebutkan dalam penelitian ini sebagai pihak yang menjadi subyek kajian penelitian. Dalam mengedukasi publik tentang Partai Demokrat, Partai Demokrat menggunakan berbagai metode musyawarah di semua level partai, mulai dari cabang lokal hingga pusat nasional dan terakhir langsung ke masyarakat umum.

Bukan hanya Partai Golkar yang terlibat dalam kegiatan yang sama. Rapat kerja PK (Pengelola Kecamatan) dan PL (Perkotaan) sebaiknya diadakan di tingkat DPD II atau tingkat kabupaten/kota. Anggota Partai Golkar akan menerima materi pendidikan politik dari pengurus setelah mendapat penyuluhan kesadaran politik, dan selanjutnya anggota akan diminta untuk menyelenggarakan rangkaian acara yang berpusat pada materi pendidikan politik yang disampaikan oleh para pakar atau tokoh terpercaya lainnya di

partai. Di sisi lain, berbeda dengan Partai Golkar yang bisa dibilang partai muda yang beroperasi di Semarang, Gerindra bertemu langsung dan mengunjungi warga sebelum meminta mereka menyampaikan aspirasinya untuk daerah sekitar Kota Semarang dengan menyesuaikan apa yang mereka inginkan dan kebutuhan warga Kota Semarang (Aristino, 2017).

Pada penelitian kedua Penelitian ini menggambarkan kegiatan pendidikan politik di Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto sebagai upaya konsolidasi dan penguatan ideologi partai. Kegiatan ini berorientasi sebagai upaya penyatuan kekuatan kelembagaan internal DPD Partai Gerindra Jawa Timur, yaitu sosialisasi terhadap tahapan di pemilu serentak, tantangan dan peluang Partai Gerindra menghadapi Pemilu 2019 dan strategi kemenangan Partai Gerindra. Pendidikan politik akan dihadiri beberapa kalangan seperti kader, relawan, simpatisan, dan internal Partai Gerindra.

Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan bahwa dalam kegiatan ini pun terdapat tantangan tersendiri pada saat pelaksanaan berlangsung, diantaranya pola penyampaian materi yang kurang tepat, sehingga tidak memunculkan interaksi yang efektif antara pemateri dengan para hadirin, sehingga materi yang disampaikan tidak tersampaikan secara efektif

Studi berikutnya skripsi yang ditulis oleh Girid Tri Handayani (2016) dengan judul "*Peran Tokoh Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri*". Penelitian ini berfokus pada upaya pimpinan parpol di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri menyampaikan materi pendidikan politik kepada generasi milenial.

Penelitian ini juga menggambarkan bagaimana tokoh partai politik di Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri memfasilitasi reaksi dan tindakan generasi milenial terhadap pendidikan politik. Persamaan penelitian yang dimiliki dengan penulis ialah dalam penelitian tersebut membahas tentang urgensi pendidikan politik yang seharusnya diberikan

kepada generasi muda milenial, di era disrupsi ini untuk berbagai kegiatan politik bahkan hingga pengkaderan sudah memiliki banyak perbedaan dari yang sebelum – sebelumnya, dapat dilihat dari pelaksanaan pendidikan politik saat ini dapat dikemas menjadi rangkaian kegiatan yang menarik sehingga menjadi daya tarik menjadi calon peserta kegiatan, misalnya dengan mengundang pemateri yang cukup ternama dalam tokoh – tokoh politik ataupun influencer yang terjun dalam dunia politik.

1. Era Disrupsi

Dalam sebuah penelitian yang ditulis oleh Muhammad Nur Rizal (2013) dengan judul “*Menghadapi Era Disrupsi*”. Penelitian ini memiliki fokus terhadap situasi dunia yang dihadapi fenomena disruption (disrupsi), dimana pergerakan dunia industry ataupun kompetisi kegiatan tidak lagi linear. Perubahannya sangat kilat, esensial dengan memporandakan pola aturan lama guna menciptakan aturan terkini. Disrupsi menginisiasi lahirnya bentuk bidang usaha terkini dengan strategi lebih inovatif serta disruptif. Jangkauan perubahannya besar mulai dari dunia bidang usaha, perbankan, transportasi, social warga, sampai pendidikan. Periode ini hendak menuntut kita untuk berubah.

Pada perihal ini penulis berargumen, tidak diragukan lagi, masa disrupsi ini hendak mendesak terbentuknya digitalisasi sistem Pendidikan, tidak lain pada Pendidikan politik. Timbulnya inovasi aplikasi teknologi semacam Ruang Guru ataupun Google Classroom akan menginspirasi lahirnya aplikasi semacam di aspek pendidikan. Pada jurnal ini di jelaskan dapat jadi fungsi sekolah hendak tergantikan oleh ruang virtual serta berakibat dalam partisipan ajar yang kemudiannya akan berfikir untuk apa guru di masa disrupsi, sementara itu pada sebagian pandangan kegiatan belajar mengajar sekolah tidak bisa tergantikan oleh ruang virtual.

Pendidikan politik di masa disrupsi bertentangan dengan masa lebih dahulu, yang berkarakter monolitik, satu arah serta berkarakter in doktrinatif. Saat ini pendidikan politik lebih terbuka, partisipatif dan mengaitkan seluruh pengelola kebutuhan. Melalui keluarga nilai- nilai dasar berdemokrasi mulai disemaikan. Sekolah dengan pendekatan pendidikannya yang terkini bisa membagikan penguatan dengan berbagai macam diskusi dialog masyarakat, memperdebatkan isu- isu politik kontemporer. Agama dan interaksi jamaah ditempat- tempat ibadah membagikan bekal yang kuat dari anutan agama serta dasar keahlian social yang dibutuhkan pada kesertaan politik. Melewati tempat kegiatan, masyarakat juga memperoleh bonus literasi politik. Pengenalan orang dalam golongan social sedikit banyak juga akan memastikan opsi politik seseorang. Dalam kesimpulannya, di masa dengan kemajuan media komunikasi semacam saat ini ini, pesan- pesan politik bisa dengan lebih kilat sampai pada khalayak. Literasi media bisa menaikkan kesertaan politik dengan cara lebih penting. (Bakri, 2012).

F. Metode Penelitian

1. Jenis Pendekatan

Penulis akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Dimana penulis akan melakukan penelitian yang memfokuskan diri sendiri melakukan penelitian terkait latar belakang, interaksi dan kondisi masyarakat tertentu, dan penulis akan melakukan penelitian terhadap kegiatan Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional sehingga menggunakan jenis penelitian studi kasus. Jenis penelitian kualitatif ini menggunakan metode penelitian deskriptif analitis. Data yang diperoleh merupakan hasil observasi, wawancara, rekaman, analisis, catatan lapangan yang disusun oleh peneliti di lokasi penelitian dan bukan dalam bentuk angka.

Metode penelitian kualitatif sering disebut juga sebagai penelitian naturalistik sebab latar belakang serta situasi saat riset dengan alami serta apa

adanya. Jadi, saat peneliti ada di lapangan serta diluar lapangan kondisi subjek yang diawasi berkarakter tidak berganti. Peneliti ialah instrumen untuk riset kualitatif itu sendiri yang jadi kunci riset. Peneliti yang memutuskan fokus riset, memilah pelapor informasi, pengumpulan informasi, mengolah informasi, dan membuat kesimpulan atas apa yang diawasi.(Sugiarto, 2015).

Dengan memperbanyak data, mencari koneksi ke bermacam basis, menyamakan, serta menciptakan hasil bersumber pada informasi yang sesungguhnya, peneliti melaksanakan analisa informasi(bukan berbentuk nilai). Penemuan analisa informasi disajikan pada wujud cerita naratif yang relevan dengan suasana yang diawasi. Informasi dihidangkan pada bagan menanggapi persoalan yang sudah diformulasikan lebih dahulu.

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell(1998) pada bukunya Sri Wahyuningsih dimana studi kasus ialah menggali sesuatu kejadian khusus ataupun permasalahan kurun durasi khusus serta aktivitas(event, cara, program ataupun golongan social) dan mempersiapkan data dan dengan cara nyata serta mendalam dengan mempraktikkan bermacam metode pengumpulan informasi sepanjang periode tertentu (Wahyuningsih, 2013).

Studi kasus dimulai dengan mengidentifikasi permasalahan khusus yang akan dideskripsikan dan di analisa. Ilustrasi permasalahan berbentuk kelompok, orang, komunitas prosedur ketetapan dan peristiwa berarti. Satu permasalahan dapat diseleksi ataupun sebagian permasalahan di pengenalan alhasil mereka bisa dibanding. Riset permasalahan di ambil dari kenyataan yang terdapat alhasil bisa mengakumulasi data yang cermat tidak pudar oleh durasi. Studi riset permasalahan di artikan selaku pendekatan kualitatif sebab periset mempelajari kehidupan jelas, sistem cuma selaku kontemporer(permasalahan) ataupun sebagian permasalahan yang dibatasi dari durasi kewaktu, melewati data informasi mendetail dan mendalam pengumpulan yang mengaitkan

bermacam basis data semacam, tanya jawab, observasi, tanya jawab, modul, dan informasi akta. (Cresswell, 1998).

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber. Teknik penyelesaiannya menggunakan dua sumber, yaitu sumber data primer dan data sekunder, sebagai berikut :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh melalui observasi lapangan yang diperoleh dari narasumber terkait melalui wawancara langsung. Observasi dengan teknik penyaringan data yang diamati peneliti secara langsung tanpa ada unsur kesengajaan untuk mengatur, mempengaruhi dan memanipulasinya. Dalam observasi ini dilakukan pengamatan dan pendokumentasian pada pihak – pihak yang mencampuri urusan Pendidikan Politik di DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yakni melalui media perantara dari pihak lain. Sumber data sekunder sebagai data pendukung data primer yang sudah didapatkan sebagai penyesuaian kebutuhan lapangan. Data sekunder penelitian ini diperoleh melalui buku, jurnal, artikel serta literatur yang berkaitan dengan Pendidikan Politik yang diselenggarakan oleh DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta.

G. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah tahap yang bernilai pada studi penelitian. Pengumpulan data ataupun informasi pada pendekatan riset permasalahan bisa didapat dari bermacam berbagai basis data. Sebab riset permasalahan sendiri mengaitkan pengumpulan informasi yang relatif banyak

untuk membuat cerminan yang mendalam dari sesuatu permasalahan. Menurut Yin ada beberapa ragam dalam pengumpulan informasi **pertama** pemilihan bermuatan pesan, skedul, informasi peristiwa, ide, hasil riset, penilaian dan postingan. **Kedua**, rekaman arsip berbentuk layanan rekaman, survei informasi, denah, catatan julukan serta rekaman individu berbentuk novel setiap hari dan penanggalan. **Ketiga**, tanya jawab berkarakter open ended. **Keempat**, pemantauan langsung. **Kelima**, pemantauan partisipasan, Keenam, unit fisik berbentuk perangkat teknologi alat. (Yin, 1998)

Karena menjadi landasan utama dari penelitian guna mendapatkan data pendukung yang diperlukan. Perolahan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti, Observasi langsung, wawancara mendalam, studi dokumen serta triangulasi. (Sugiyono, 2016).

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti:

a. Wawancara

Ialah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara percakapan seseorang antar dua pihak yang saling berinteraksi melalui proses tanya jawab. Dalam teknik wawancara penulis akan mengajukan beberapa pertanyaan yang sudah dirancang untuk mendapatkan jawaban – jawaban atas pertanyaan yang diajukan untuk kepentingan penelitian. Wawancara ini nantinya akan melibatkan beberapa tokoh yang bergerak dibelakang layar terkait agenda pendidikan politik yang diadakan oleh Partai Amanat Nasional.

b. Observasi

Penulis akan melakukan penelitian secara lebih mendalam terkait agenda pendidikan politik yang diagendakan oleh Partai Amanat Nasional melalui media sosial yang sengaja dibuat sebagai sarana pendidikan politik, misalnya instagram feeds, konten maupun reels

yang di publikasi melalui akun sosial media dari Sekolah Politik Partai Amanat Nasional.

c. Studi Literatur

Dalam mengambil data pada penelitian ini, penulis akan mengambil beberapa gambar yang diyakini bisa menjadi penunjang pada penelitian ini, misalnya akun sosial media sekolah politik Partai Amanat Nasional, dokumentasi pendidikan, dan kebutuhan lainnya. Dengan dokumentasi tersebut, penulis akan melakukan penelitian lebih mendalam terkait pendidikan politik yang diagendakan oleh Partai Amanat Nasional, terkait dengan menganalisis berbagai teori terkait fokus penelitian.

d. Triangulasi

Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan menggunakan penggabungan berbagai teknik pengumpulan datandan sumber data yang telah dikumpulkan. Dengan melakukan penelitian ini berarti penelitian melakukan pengumpulan data sekaligus pengujian kredibilitas data dengan menggunakan data observasi, wawancara, dan studi dokumen (Sugiyono, 2016)

H. Teknik Analisis Data

Sebuah data di dapat setelah observasi serta melakukan pengumpulan data melalui wawancara, selanjutnya dilakukan analisis mendalam pada data. Melakukan proses analisa pada data dari hasil penemuan di lapangan merupakan hal yang penting dalam penelitian. Teknik analisis dilakukan dengan proses penyusunan, pemilihan serta mengaitkan antara isi data dengan teori – teori yang digunakan dengan harapan mendapatkan jawaban dari hasil analisa tersebut.

Menurut Cresswell dalam buku Wahyuningsih (2013) studi kasus mempunyai kesesuaian dengan etnografi analisisnya terdiri dari atas“

deskripsi teori” mengenai permasalahan serta pengaturannya. Apabila permasalahan menunjukkan suatu kasus sehingga untuk menganalisisnya butuh mengakumulasi banyak basis informasi untuk meyakinkan tiap tahap pada pergantian permasalahan. Apabila ada permasalahan yang terkini sehingga menganalisa data buat memutuskan bagaimana peristiwa itu dapat terjalin.

Selanjutnya pendekatan studi kasus membutuhkan adanya dengan pengumpulan informasi yang banyak sebab analisis studi berupaya membuat cerminan yang mendalam dari sesuatu permasalahan serta insiden supaya mencapai analisa yang bagus selaku wujud kategorisasi sesuatu cerita yang terinci dari permasalahan yang akan timbul. (Wahyuningsih, 2013).

I. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis membuat skripsi ini kedalam 5 bab yang tersusun secara rinci dan sistematis, sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Penjelasan mengapa penelitian ini diperlukan akan diberikan pada bab pertama, kemudian masalah akan dirumuskan. Juga disertakan penjelasan tentang tujuan penelitian penulis dan hasil yang diharapkan. Metode dan pendekatan penelitian, definisi teori dan konsep, serta bagaimana penelitian ini disusun menjadi satu tulisan, akan dibahas pada Bab I.

BAB II TEORI PARTAI POLITIK DAN PENDIDIKAN POLITIK

Teori krisis sejarah dan teori modernisasi sosial-ekonomi, yang keduanya memiliki relevansi dengan pendidikan politik, dibahas secara mendalam pada bagian ini. Untuk meningkatkan konsep-konsep teoritis yang akan digunakan

untuk menganalisis data penelitian, teori-teori tersebut akan dijelaskan dalam bab ini.

BAB III GAMBARAN UMUM PARTAI AMANAT NASIONAL

Bab III diisi tentang gambaran umum objek yang diteliti yakni sejarah berdirinya Partai Amanat Nasional secara umum, dan melihat visi dan misi Partai Amanat Nasional

BAB IV PENDIDIKAN POLITIK DI ERA DISRUPSI PARTAI AMANAT NASIONAL

Pada bagian ini akan diuraikan secara detail hasil analisa dari temuan data – data dilapangan mengenai bagaimana Partai Amanat Nasional melakukan kegiatan pendidikan politik generasi muda di era disrupsi pada tahun 2019 – 2021.

BAB V BAGAIMANA DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK PARTAI AMANAT NASIONAL TAHUN 2019 – 2021

Setelah menguraikan bagaimana pendidikan politik diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional, dalam bab ini juga akan dijelaskan bagaimana efektivitas yang dihasilkan dalam sebuah kegiatan pendidikan politik yang diselenggarakan oleh Partai Amanat Nasional Tahun 2019 – 2021.

BAB II

PERAN PARTAI POLITIK & PENDIDIKAN POLITIK

A. Partai Politik dan Pendidikan Politik

1.1 Partai Politik

1.1.1. Teori teori krisis situasi historis yang terjadi disaat suatu sistem politik masyarakat mengalami masa transisi karena perubahan dari struktur masyarakat tradisional menjadi struktur masyarakat modern yang berstruktur kompleks. Kondisi seperti ini biasanya mengalami perubahan seperti penambahan penduduk, perbaikan fasilitas Kesehatan, meratanya distribusi pendidikan, perubahan pola industry dan pertanian dan peningkatan aspirasi. Situasi ini sangat berkaitan dengan situasi di era disrupsi ini lebih tepatnya di masa Pandemi Covid-19 dimana setiap masyarakat dibatasi kegiatannya, sedangkan semua orang harus memenuhi kebutuhannya masing – masing, yaitu bekerja. Maka melihat kondisi tersebut, terciptalah berbagai alternatif untuk melakukan hal tersebut, diantara dengan rapat melalui virtual zoom, memanfaatkan google classroom sebagai pengganti sekolah, dll. Hal – hal tersebut diduga dapat menimbulkan meningkatnya aspirasi dan tuntutan masyarakat kepada Pemerintah.

Hal ini tentu menjadi perhatian menarik bagi beberapa pihak salah satunya adalah partai politik. Sebagai sarana masyarakat untuk menyalurkan aspirasi politiknya, sudah seharusnya partai politik memahami perubahan dinamika kehidupan yang membawa beberapa peluang dan juga tantangan yang harus dihadapi di era yang semakin modern. Terlebih lagi adanya partai politik terbentuk dengan salah satu fungsinya adalah mengatasi krisis politik akibat adanya perubahan dinamika kehidupan masyarakat. Sehingga mau tidak mau partai politik itu sendiripun harus berubah mengikuti perkembangan zaman yang ada.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, partai politik memiliki dua fungsi bagian yakni fungsi internal dan juga eksternal. Dalam fungsi internal partai politik memiliki fungsi untuk melakukan pembinaan terhadap para kadernya. Selain pembinaan, Organisasi partai memiliki tanggung jawab di dalam struktur mereka sendiri, termasuk penyediaan kesempatan pendidikan, pengakomodasian pelaporan, pemutakhiran serta menjaga ideologi partai politik itu sendiri. Selain fungsi internal, partai politik juga memiliki fungsi eksternal yakni dengan sasaran masyarakat secara langsung. Misi partai politik adalah memberdayakan masyarakat dengan tanggung jawab, moral dan etika untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat (Firmanzah, 2018) .

Sebagai penunjang fungsi eksternalnya, partai politik juga memiliki peran sebagai penghubung atau sarana komunikasi politik. Hal ini di implementasikan dalam bentuk penampungan aspirasi dan juga pendapat dari masyarakat. Adanya akomodir dari aspirasi dan pendapat masyarakat inilah yang nantinya akan dibawa oleh partai politik tersebut untuk memberikan pengaruh rencana pemerintah dan implementasi kebijakan saat ini. Selain sebagai sarana penampung aspirasi politik, partai politik juga merupakan sarana untuk melakukan sosialisasi politik. Proses ini adalah dimana seseorang telah mendapatkan sikap serta orientasi terhadap fenomena politik. Sosialisasi politik yang biasanya sangat sering dilakukan adalah melalui media masa dan juga pendidikan politik (Surbakti, 2010).

Setelah melakukan sosialisasi politik baik itu melalui media ataupun melalui pendidikan politik, tentu sebuah partai politik menggunakan dua fungsi tadi untuk melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen ini dilakukan untuk menjaring kader-kader partai politik yang memiliki kualitas. Dengan demikian proses yang dimulai dari sosialisasi politik ini menjadi sangat penting bagi partai politik sebab, dari situlah partai akan memiliki potensi untuk menemukan kader-kader baru yang tentu memiliki kompetensi yang di inginkan oleh partai. Dengan dimilikinya kader-kader partai yang mumpuni maka secara otomatis partai politik akan mampu menghadapi

segala macam bentuk dinamika sosial politik yang terjadi. Salah satu yang sering dihadapi adalah adanya perbedaan perspektif di masyarakat yang bukan tidak mungkin menjadi penyebab terjadinya konflik. Tugas partai politik disini adalah memberi bantuan guna mengatasi konflik yang terjadi di masyarakat tersebut (Firmanzah, 2008).

1.2 Pendidikan Politik

Pendidikan politik disebut pula sebagai political forming atau Bildung. Disebut “forming” karena terkandung intensi untuk membentuk insan politik yang menyadari status/kedudukan politiknya di tengah masyarakat. Dan disebut “Bildung” (pembentukan atau pendidikan diri sendiri), karena istilah tersebut menyangkut aktivitas : membentuk diri sendiri, dengan kesadaran penuh dan tanggung jawab sendiri untuk menjadi insan politik (Kartono, 2009).

Pendidikan politik pada hakekatnya merupakan bagian dari pendidikan orang dewasa. Pendidikan macam ini tidak menonjolkan proses kultivasi individu menjadi “intelektual politik” yang bersinggasa dalam menara gading keilmuan, atau menjadi pribadi kritis dan cerdas “yang terisolasi” dari masyarakat lingkungannya. Akan tetapi lebih menekankan relasi individu dengan individu lain, atau individu dengan masyarakatnya di tengah medan sosial; dalam satu konteks politik, dengan kaitannya pada aspek-aspek sosial-ekonomi-budaya; di tengah situasi-situasi konflik yang ditimbulkan oleh bermacam-macam perbedaan, atau oleh adanya pluriformitas (kemajemukan budaya) (Kartono, 2009).

Adanya proses pendidikan politik ini tentu tujuan utamanya adalah membangun masyarakat serta mengembangkan potensi masing-masing individu guna memperoleh individu yang memiliki kualitas. Hasil akhirnya adalah sebuah partai politik akan lebih mudah melakukan penjurangan kader-kader baru yang dibutuhkan untuk pengembangan partai politik kedepannya

Pendidikan politik, atau sosialisasi politik, disampaikan melalui berbagai cara atau agen, seperti dijelaskan oleh Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas' oed (1978). Berikut beberapa contohnya (Wanma, 2015) :

1. Keluarga

Pengaruh langsung dan tidak langsung orang tua merupakan sistem sosialisasi pertama yang ditemui seseorang. Cara yang paling nyata di mana keluarga membentuk pandangan anggotanya tentang otoritas adalah melalui pengajaran dan teladan yang mereka lakukan atau tidak lakukan sendiri. Selain mempengaruhi bagaimana orang memilih di masa depan, keluarga juga memiliki peran penting dalam membentuk identitas individu lintas etnis, bahasa, agama, dan sosial ekonomi.

2. Sekolah

Orang yang berpendidikan lebih mungkin menyadari peran yang dimainkan pemerintah dalam kehidupan sehari-hari mereka, tertarik untuk belajar tentang kehidupan politik dan proses politik, dan mampu membuat keputusan politik yang terinformasi. Pemuda menerima pendidikan tentang politik dan tempatnya di sekolah. Memahami struktur dan dinamika politik dibuat lebih jelas di ruang kelas. Aturan permainan politik bukanlah satu-satunya hal yang dapat dipengaruhi oleh sistem pendidikan. Pendidikan sejarah nasional di sekolah telah terbukti meningkatkan kesetiaan siswa pada sistem politik.

3. Media Massa

Di dunia sekarang ini, orang perlu terus berhubungan satu sama lain untuk berbagi pengalaman dan terinspirasi oleh minat yang sama. Bahwa “surat kabar, radio, TV, dan majalah” berperan penting dalam menyebarkan nilai-nilai kontemporer kepada masyarakat luas. Selain melaporkan kejadian politik,

media juga mengirimkan pesan tentang keyakinan dan cita-cita terpenting masyarakat tertentu. Artinya, sistem media massa yang berfungsi dengan baik dapat berdampak signifikan terhadap pandangan politik masyarakat .

4. Kontak Politik Langsung

Terlepas dari seberapa dalam keluarga, sekolah, atau media seseorang telah mendarah daging citra tertentu dari sistem politik, jika orang tersebut diabaikan oleh partainya, pandangan orang tersebut tentang dunia politik kemungkinan besar akan bergeser. Kesetiaan dan kesiapan mereka untuk menghormati hukum dan terlibat secara politik di dalamnya dapat dipengaruhi oleh partai politik, kampanye pemilu, krisis politik internasional, dan daya tanggap lembaga pemerintah terhadap tuntutan individu dan kelompok. Oleh karena itu, kekuatan pendorong utama di balik penyebaran pendidikan politik adalah partai politik.

Apa yang menjadi materi dan juga kurikulum dalam Pendidikan politik haruslah dibagi sesuai dengan sasaran yang dituju. Prayoga (2013) mengemukakan bahwa sasaran pendidikan politik terbagi menjadi dua yakni Pertama, materi pendidikan politik terutama yang ditujukan kepada masyarakat haruslah mencakup posisi, hak dan kewajiban dan juga tanggung jawab seluruh warga negara. Ini dilandaskan pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hal ini juga diatur tentang pemahaman mengenai konstitusi negara serta konstelasi politik saat ini.

Kedua, pendidikan politik juga diberikan kepada struktural partai dengan lebih menekankan pada orientasi pematapan kader untuk menunjang pengembangan program partai politik itu sendiri. Dengan demikian hal ini menjadi penting terutama melalui pendidikan politik inilah, loyalitas serta dedikasi kader partai akan meningkat. Dampak positif yang lain adalah

peningkatan kualitas kader-kader partai politik untuk membangun visi ke depannya.

Metode yang digunakan dalam hal memberikan pendidikan politik tentu juga memiliki perbedaan cara. Perbedaan ini dilatarbelakangi oleh siapa yang akan menerima pendidikan politik tersebut. Bagi target masyarakat umum, pendidikan dilaksanakan melalui dua skema yakni secara langsung maupun secara tak langsung. Seperti yang sering kita lihat dalam kehidupan media saat ini memainkan pengaruh penting dalam proses pendidikan politik kepada masyarakat secara tidak langsung. Sementara itu, proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik kepada anggota, struktur, atau kader-kader partai biasanya diberikan secara langsung melalui pendekatan doktrinal. Hal ini dilakukan untuk lebih memperkuat ideologi partai politik itu sendiri (Prayoga,2013).

Jenis pendidikan politik ini harus berlandaskan pada mimpi dan identitas bersama bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pendidikan politik di Indonesia dimaksudkan untuk menumbuhkan sifat-sifat tertentu pada warga negaranya, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut :

1. Sadar akan hak dan kewajiban, tanggung jawab moral dan politik terhadap kepentingan bangsa dan negara, serta mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan memberikan keteladanan yang baik.
2. Sadar mentaati hukum dan UUD 1945, serta memiliki sikap nasionalisme yang teguh dan tidak sempit.
3. Aktif berpartisipasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan politik;
4. Aktif mendukung sistem kehidupan nasional yang demokratis.

Pendidikan politik tidak hanya didasarkan pada kepribadian bangsa Indonesia yang ada di nilai-nilai Pancasila saja akan tetapi juga didasarkan pada budaya politik itu sendiri. Budaya politik ini berasal dari kehidupan yang bersifat universal dan juga modern. Ini didasarkan pada prinsip kebebasan, persamaan hak dan kewajiban serta juga *affirmative action* (Keterwakilan) juga harus diperhatikan.

Bangsa yang merdeka harus mengutamakan pendidikan politik. Individu yang berpendidikan baik dan tidak memihak secara politik sangat penting untuk setiap upaya demokrasi atau demokratisasi yang berhasil. Mereka yang berpengalaman dalam politik memahami tanggung jawab dan hak istimewa mereka sebagai warga negara. Agar warga negara dapat memantau proses pengambilan keputusan publik dan mendorong akses terhadap kebijakan publik, terlepas dari apakah mereka terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam pengambilan keputusan dimaksud. Karena gagasan bahwa warga negara harus memiliki suara dalam politik memperoleh daya tarik, partai politik muncul untuk menjadi tempat pertemuan bagi warga negara dan perantara antara mereka dan pemerintah mereka (Satmoko, 2015).

Metode sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya suatu pendidikan politik yang diberika. Kharism (2015) mengemukakan bahwa guna mencapai efektifitas pendidikan politik ketika hal tersebut dilaksanakan maka sebuah partai politik perlu melaksanakan pendidikan politik tersebut dengan cara menggunakan metode baru metode baru serta dengan materi yang disesuaikan dengan karakter, kebutuhan, kepentingan, dan minat, serta disesuaikan dengan tingkat pengalaman dan pemahaman mereka tentang politik. Karena dengan dilakukannya pendidikan politik di diharapkan dapat menghasilkan pemilih yang cerdas, kritis dan bertanggung jawab.

BAB III

GAMBARAN UMUM PARTAI AMANAT NASIONAL

A. Sejarah Partai Amanat Nasional

Seperti yang kita ketahui pasca lengsernya Presiden Soeharto pada tahun 1998 menandai berakhirnya era Orde Baru dan berubah menjadi era reformasi. Era reformasi ini bukan hanya ditandai dengan munculnya perubahan-perubahan dalam sistem tata kelola pemerintahan negara saja akan tetapi juga ditandai dengan munculnya partai-partai politik baru setelah sebelumnya saat masa Orde Baru hanya ada tiga partai politik saja. Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu partai yang lahir pada era reformasi ini yang di deklarasikan pada tanggal 23 Agustus 1998. Dalam pendeklarasiannya, “Partai Amanat Nasional (PAN) di deklarasikan oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan Ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya” (Rahman, 2021).

“Pengurus Pusat Muhammadiyah dan perwakilan tingkat daerah (provinsi) bertemu untuk Tanwir Muhammadiyah di Semarang, Indonesia, pada tanggal 5-7 Juli 1998”. Sebagian besar masyarakat dalam rapat komisi menginginkan anggota Muhammadiyah membentuk organisasi politik baru. Namun, keputusan formal tersebut menunjukkan bahwa Muhammadiyah tidak akan menjadi partai politik dan tidak akan menjadi dasar pembentukan partai politik. Namun, anggota Muhammadiyah bebas untuk bergabung dan bekerja dengan partai politik yang mereka pilih (Syafri Wirman, 2003).

Kelahiran Partai Amanat Nasional (PAN) dibidani oleh Majelis Amanat Rakyat (MARA), salah satu Gerakan reformasi pada era pemerintahan Soeharto,

PPSK Muhammadiyah dan Kelompok Tebet, PAN di deklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional. Diantaranya Prof Dr. H. Amien Rais, mantan ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Haraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, dan lainnya. Sebelumnya pada pertemuan tanggal 5-6 Agustus 1998 di Bogor, mereka sepakat membentuk Partai Amanat Bangsa yang kemudian berubah nama menjadi Partai Amanat Nasional (PAN).

Pada awal kemunculannya, Partai Amanat Nasional banyak didukung oleh lapisan masyarakat terutama masyarakat umat Islam dan warga Muhammadiyah. Apalagi salah satu deklarator pendiri partai ini Prof. DR. H. Amien Rais merupakan mantan Ketua Umum Muhammadiyah. Sehingga banyak yang mengidentikan bahwa PAN ini merupakan gerakan politik Muhammadiyah di kalangan masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, PAN bukanlah partai politik dari golongan tertentu serta tidak ada hubungan apapun antara PAN dan Juga Muhammadiyah. Meski tidak ada hubungan formal antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Muhammadiyah, peran ganda Amien Rais sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN dan mantan Ketua Pengurus Pusat Muhammadiyah membuatnya sangat sulit untuk diurai (PP). Menunjukkan karakter Amien Rais yang mengesankan. Karena itu, PAN adalah Muhammadiyah dan Muhammadiyah adalah PAN meresap ke dalam benak seseorang, sehingga sulit untuk memisahkan keduanya (Wirman & Nasri, 2003).

Partai Amanat Nasional memahami tugas dan kewajiban sejarah dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial". Oleh karena itu Partai Amanat Nasional harus memiliki arah atau program perjuangan

sebagai langkah untuk terwujudnya cita-cita dalam penyelenggaraan negara atau pemerintah.

Misi PAN adalah melindungi dan memajukan kemandirian, keadilan, serta pembangunan spiritual dan material rakyat. Nilai-nilai partai didasarkan pada prinsip moralitas Kristiani, kasih sayang, dan pluralisme. Selain itu, menanggapi risiko disintegrasi, PAN mengusulkan pembicaraan tentang struktur negara federasi. Pembahasan berpusat pada alokasi sumber daya yang adil agar seluruh penduduk Indonesia dapat berpartisipasi penuh dalam demokrasi (Syafri Wirman, 2003).

B. Visi dan Misi Partai Amanat Nasional

Unit Partai Amanat Nasional mencakup pria serta wanita dari seluruh umur, suku bangsa, kiblata seksual, serta pandangan hidup politik di Indonesia. Dengan sifat-sifat itu, PAN bercita-cita jadi partai politik yang unggul di Indonesia, mengetuai jalur mengarah terwujudnya warga madani yang seimbang serta mampu, rezim yang bagus serta bersih pada negeri Indonesia yang demokratis serta berkuasa, dan pengakuan kepada Tuhan selaku Yang Maha Satu. basis seluruh kebaikan.

Setelah itu PAN mempunyai misi untuk menciptakan PAN selaku partai yang dekat serta membela orang, menciptakan PAN selaku partai yang modern bersumber pada system serta manajemen yang menang dan adat bangsa yang terhormat, menciptakan aturan rezim Indonesia yang memastikan keselamatan biasa, dan mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan Indonesia yang Bersuatu, berkuasa, bergengsi, turut melakukan kedisiplinan bumi yang bersumber pada kebebasan, ketenangan kekal, serta kesamarataan sosial, dan dihormati pada pergaulan global (PAN, Sejarah PAN, 2021).

C. Struktural Pengurus DPW PAN DKI Jakarta

Dalam suatu partai politik itu memiliki sebuah anggota aktif yang dapat bertanggung jawab pada kemajuan partainya. Begitu juga dengan Partai Amanat Nasional sebagai partai yang mendapatkan 9 kursi dalam DPRD DKI Jakarta pastinya memiliki anggota aktif yang bertanggung jawab sebagai kemajuan partainya. Struktural dalam badan partai amanat nasional dibagi menjadi beberapa penanggung jawab dalam bidangnya, berikut daftar structural aktif pada periode 2020 hingga 2025 didalam tubuh DPW PAN DKI Jakarta :



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaianamanatnasional@gmail.com

Lampiran SK DPP PAN Nomor : PAN/A/Kpts/KU-SJ/ 075 /III/2022
Tentang : Perubahan Pertama Kepengurusan DPW PAN Provinsi DKI Jakarta
Periode 2020-2025

**SUSUNAN PENGURUS
DEWAN PIMPINAN WILAYAH PARTAI AMANAT NASIONAL
PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE 2020 – 2025**

I. MAJELIS PENASIHAT PARTAI WILAYAH

Ketua	: Drs. H. NANANG KOMARA, M.Si
Wakil Ketua	: Johan Musyawa, S.E.
Wakil Ketua	: Ali Alamsyah
Sekretaris	: Dr. H. Bambang Kusumanto, M.Sc.
Anggota	: Hj. Dra. Maemunah, M.Si.
Anggota	: Hj. Anita Aulia, S.E.
Anggota	: Drs. Suwardi

II. PENGURUS HARIAN

Ketua	: EKO HENDRO PURNOMO, S.Sos.
Wakil Ketua	: Farid Turigan, S.T., M.M.
Wakil Ketua	: Fadli Arsil, S.Kom, M.Si
Wakil Ketua	: Encep Isnuq
Wakil Ketua	: Syamsudin, S.Sos.
Wakil Ketua	: Deni Wahyudi
Wakil Ketua	: R.A Shanti Dewi M, S.H., M.H.
Wakil Ketua	: Gaus Kaisuku, S.Sos
Wakil Ketua	: Ryan Andika
Wakil Ketua	: Rr. Endah Octavia Hartanti
Wakil Ketua	: Ayu Khadijah Azhari
Wakil Ketua	: Januardi Nyman, S.H.
Wakil Ketua	: Riska Kartini, S.H.
Wakil Ketua	: Thio Nelson Arianto, S.Kom., M.M.
Wakil Ketua	: Yonda Nutakwa, S.T.
Wakil Ketua	: Mukhtar Lutfi
Sekretaris	: HUSEN, S.H.
Wakil Sekretaris	: Helmi Azwary Simanjuntak, S.E.
Wakil Sekretaris	: Yuyun Afinda, S.Pd.
Wakil Sekretaris	: Hendrik Ferdinand, S.Sos.
Wakil Sekretaris	: Shaira Banu
Wakil Sekretaris	: Putri Tasya, S.Kom.
Wakil Sekretaris	: Budi Santoso, S.H., M.H.
Wakil Sekretaris	: Fadel Islami Rahmat



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaianamanatnasional@gmail.com

Wakil Sekretaris	: Muhamad Lutfi Agizal, S.Psi.
Wakil Sekretaris	: Gita Sinaga
Wakil Sekretaris	: Keira Shabrina Jafariah
Wakil Sekretaris	: Marshallyka Layonsari Putri
Wakil Sekretaris	: Icha Mustika Sari
Wakil Sekretaris	: Mohammad Amada, S.Kom.
Wakil Sekretaris	: Asadullah Cucunda Majid, M.I.Kom
Wakil Sekretaris	: M. Sopian, S.H.
Bendahara	: HABIB MUHAMAD BIN SALIM ALATAS
Wakil Bendahara	: Tejo Sumiratno, S.Sos.
Wakil Bendahara	: Ari Kresnapati Kunarto, S.E.
Wakil Bendahara	: Merry Puspita

III. BADAN-BADAN

- 1. Badan Pengembangan Organisasi Dan Keanggotaan**
Ketua : Farid Tarigan, S.T., M.M.
Sekretaris : Helmi Azwary Stimanjuntak, S.E.
- 2. Badan Perkaderan**
Ketua : Fadhli Arsil, S.Kom, M.Si
Sekretaris : Yuyun Afinda, S.Pd.
- 3. Badan Pemenangan Pemilu**
Ketua : Encep Ishaq
Sekretaris : Hendrik Ferdinand, S.Sos.
- 4. Badan Penelitian Dan Pengembangan**
Ketua : Syamsudin, S.Sos.
Sekretaris : Shaira Banu
- 5. Badan Pendidikan, Agama dan Kebudayaan**
Ketua : Deni Wahyudi
Sekretaris : Putri Tasya, S.Kom.
- 6. Badan Bantuan Hukum dan Advokasi**
Ketua : R. A. Shanti Dewi M. S.H., M.H.
Sekretaris : Budi Santoso, S.H., M.H.
- 7. Badan Politik, Pertahanan dan Keamanan**
Ketua : Claus Kaisaku, S.Sos
Sekretaris : Fadel Islami Rahmat
- 8. Badan Penanggulangan Bencana**
Ketua : Ryan Andika
Sekretaris : Muhamad Lutfi Agizal, S.Psi.



**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL
(The National Mandate Party)**

RUMAH PAN, Jalan Warung Buncit Raya No. 1 A RT/RW 001/005
Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 12740
Website: pan.or.id Email: dpp.partaianamanatnasional@gmail.com

- 9. Badan Pengembangan Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)**
Ketua : Rr. Endah Octavia Hartanti
Sekretaris : Gita Sinaga
- 10. Badan Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak**
Ketua : Ayu Khadijah Azhari
Sekretaris : Keira Shabrina Jafariah
- 11. Badan Pengembangan Pemuda dan Olahraga**
Ketua : Janaardi Nyman, S.H.
Sekretaris : Marshallyka Layonsari Putri
- 12. Badan Pemberdayaan Organisasi Mitra dan Organisasi Otonom (BMO)**
Ketua : Riska Kartini, S.H.
Sekretaris : Icha Mustika Sari
- 13. Badan Sistem Informasi dan Komunikasi Partai**
Ketua : Thio Nelson Arianto, S.Kom., M.M.
Sekretaris : Mohammad Amada, S.Kom.
- 14. Badan Saksi Wilayah**
Ketua : Yonda Nutakwa, S.T.
Sekretaris : Asadullah Cucunda Majid, M.I.Kom
- 15. Badan Industri dan Perdagangan**
Ketua : Mukhtar Lutfi
Sekretaris : M. Sopian, S.H.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Maret 2022

DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI AMANAT NASIONAL


ZULKIFLI HASAN
Ketua Umum


EDDY SOEPARNO
Sekretaris Jenderal

Gambar 1 Pengurus DPW PAN DKI Jakarta

Pembentukan struktur anggota partai amanat nasional pada periode 2020-2025 secara riwayt telah melakukan perubahan satu kali. Lampiran dokumen diatas merupakan sebuah bentuk structural yang telah dilakukan perbaruan, sedangkan sebelumnya partai amanat nasional pertanggal 16 Oktober 2020 telah memiliki sebuah surat keputusan DPP PAN dengan Nomor: PAN/Kpts/KUSJ/431/2020 namun surat keputusan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku kembali terhitung dari terbitnya SK kepengurusan yang baru pertanggal 28 Maret 2022.

Pertanggal 28 Maret 2022, sebagaimana SK baru telah berlaku Eko Hendro Purnomo S.Sos alias Eko Patrio menjadi ketua harian dalam DPW DKI Jakarta Partai Amanat Nasional. Eko dibantu oleh 15 wakil ketua, 1 sekretaris yang bernama Husein, S.H dibantu 7 wakil sekretaris, serta 15 bidang atau badan – badan yang bertanggung jawab atas keberlangsungan partai amanat nasional.

Namun, dalam kegiatan pendidikan politik sebagaimana tugas dan tanggung jawab dari suatu partai politik, kini bidang pendidikan, agama dan budaya memberikan sebuah inovasi baru pada masa pandemic Covid-19. kegiatan pendidikan politik dilakukan dengan melakukan koalaborasi bersama dengan sayap partai yang dimiliki oleh Partai Amanat Nasional yaitu BM PAN.

Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BMPAN) merupakan suatu organisasi sayap partai yang dimiliki oleh PAN. BM PAN dalam structural keanggotanannya didominasi oleh para kalangan generasi anak muda hal ini seperti namanya. Melalui DPW DKI Jakarta PAN dan BM PAN terciptannya sebuah program pendidikan politik dengan memanfaatkan sebuah waktu pada kondisi pandemic Covid-19 yang serba keterbatasan ruang gerak. Adapun structural DPW BM PAN DKI Jakarta :

DEWAN PIMPINAN WILAYAH

KETUA : Denny Wahyudi

Wakil Ketua : Agus Budi
Wakil Ketua : Novito
Wakil Ketua : Bimo Tresnadipangga
Wakil Ketua : Rizal Efendi
Wakil Ketua : Muhammad Iqbal
Wakil Ketua : Wijaya
Wakil Ketua : Lili Akmalia
Wakil Ketua : Pramudhio Rizky Ananda
Wakil Ketua : Astrini Putri
Wakil Ketua : Deyar Cipta Rizki
Wakil Ketua : Juli Kharisma
Wakil Ketua : Benazir Pratiwi hamdan
Wakil Ketua : Ahmad Aulia
Wakil Ketua : Debby Carolina Samarra
Wakil Ketua : Shyntya Putri
Wakil Ketua : Atika Salsabila
Wakil Ketua : Poetra Surya Rahman
Wakil Ketua : Tenri Esa Suyoto
Wakil Ketua : Rahmat Syarif

SEKRETARIS : Ade Irmawan

Wakil Sekretaris : Taufik Hidayat
Wakil Sekretaris : Ilham Sanjani
Wakil Sekretaris : Eva Zahra Atmanegara
Wakil Sekretaris : Denis Robby Hidayat
Wakil Sekretaris : Awwaliyah Fitriani Devianingsih
Wakil Sekretaris : Elvia Caroline
Wakil Sekretaris : Mohammad Arkan
Wakil Sekretaris : Sandofa
Wakil Sekretaris : Fani Vanilla
Wakil Sekretaris : Ardiyanti Cahyaning Dyah
Wakil Sekretaris : Ferdiansyah
Wakil Sekretaris : Hanan Mukaffa
Wakil Sekretaris : Kicuy
Wakil Sekretaris : Muhammad Rohyatul Amin
Wakil Sekretaris : Ravli Rivandi
Wakil Sekretaris : Bagas Pangestu
Wakil Sekretaris : Raisa Salsabila
Wakil Sekretaris : Pipih Nopia
Wakil Sekretaris : Dinda Praska

BENDAHARA : Himawan Ramaditya

Wakil Bendahara : Anggi Anggraini
Wakil Bendahara : Ardan Primayodra Putra
Wakil Bendahara : Immanuel Tulus Hasiholan
Wakil Bendahara : Salmon Marpaung

BADAN - BADAN

1. BADAN KE-ORGANISASIAN

Ketua : Agus Budi
Sekretaris : Taufik Hidayat
Anggota : Fumiko Dewi Sari

2. BADAN PERKADERAN

Ketua : Novito
Sekretaris : Ilham Sanjani
Anggota : Muhamad Ilham Prakoso

3. **BADAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA KEPEMUDAAN**
Ketua : Bimo Tresnadipangga
Sekretaris : Eva Zahra Atmanegara
4. **BADAN EKONOMI DAN KEWIRAUSAHAAN**
Ketua : Rizal Efendi
Sekretaris : Denis Robby Hidayat
5. **BADAN HUKUM, HAM DAN LINGKUNGAN HIDUP**
Ketua : Muhammad Iqbal
Sekretaris : Awwaliyah Fitriani Devianingsih
6. **BADAN AKSI DAN PERJUANGAN RAKYAT**
Ketua : Wijaya
Sekretaris : Elvia Caroline
7. **BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**
Ketua : Lili Akmalia
Sekretaris : Mohammad Arkan
8. **BADAN HUMAS DAN MEDIA MASSA**
Ketua : Pramudhio Rizky Ananda
Sekretaris : Sandofa
Anggota : Ready Andhika Putra
9. **BADAN PENGEMBANGAN POTENSI PEREMPUAN**
Ketua : Astrini Putri
Sekretaris : Fani Vanilla
10. **BADAN SISTEM INFORMASI STRATEGIS**
Ketua : Deyar Cipta Rizki
Sekretaris : Ardiyanti Cahyaning Dyah
11. **BADAN SENI, BUDAYA, PARIWISATA, DAN OLAAHRAGA**
Ketua : Juli Kharisma
Sekretaris : Ferdiansyah
Anggota : Deny Sanjaya
12. **BADAN IDIOLOGI, PERTAHANAN, DAN KEAMANAN**
Ketua : Benazir Pratiwi hamdan
Sekretaris : Hanan Mukafa

Gambar 2 Structural DPW BM PAN DKI Jakarta

BAB IV
PERAN SERTA PENDIDIKAN POLITIK DPW PARTAI AMANAT
NASIONAL DKI JAKARTA

1. Program Pendidikan Politik DPW PAN DKI Jakarta

Periode disrupsi ini menghasilkan adanya transformasi yang besar mulai dari dunia usaha, transportasi, perbankan, sosial warga, pendidikan, sampai politik (Bashori, 2018). Partai politik saat ini berupaya beralih bentuk dalam periode disrupsi contohnya dalam aktivitas aplikasi kewajiban serta tanggung jawab yang dicoba oleh partai politik ialah pendidikan politik pada warga.

Pendidikan politik menjadi suatu determinasi yang harus dicoba dalam tiap partai politik. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Firmanzah(2008) kalau partai politik mempunyai 2 fungsi ialah dalam serta eksternal yang kemudiannya akan di implementasikan oleh partai politik dengan triknya masing- masing. Fungsi eksternal yang dipaparkan oleh Firmanzah jika fungsi partai politik memiliki kewajiban yang berarti pada berikan pembinaan, bimbingan, pemberian, kaderisasi pula melanggengkan pandangan hidup politik partai. Fungsi eksternal menerangkan gimana partai politik mempunyai kedudukan yang terpaut warga besar.

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Firmanzah, maka penulis akan membahas peran dan tantangan pendidikan politik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional DKI Jakarta. Menurut Elfriza Nicko Saputra atau biasa akrab dipanggil Nicko, selaku Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Amanat Institute, Nicko menjelaskan bahwa selain berperan sebagai edukator, partai politik juga akan melakukan regenerasi sehingga bisa melahirkan generasi -generasi baru dan meleak

terhadap isu – isu politik khususnya generasi muda. Mencerdaskan adalah tujuan utama keberlangsungan kegiatan Pendidikan politik.

“Pendidikan politik ini juga salah satu kewajiban dari partai politik manapun, tak terkecuali Partai Amanat Nasional. Jadi kalo misalnya rencana awalnya kan pengen ngebuat makin masifnya untuk seusia anak – anak muda itu belajar soal politik, tapi itu ga juga dari universitas, sekolah atau lain sebagainya. Tapi sebagai partai politik kan salah satu tugasnya untuk meregenerasi politisi baru tapi kita lakuin disini tanpa mewajibkan, jadi selain untuk meregenerasi kita juga ingin anak – anak muda ini lebih melek terhadap politik walaupun misalnya mereka tanpa ketertarikan untuk masuk ke politik, tapi setidaknya bisa paham dan melek terhadap isu – isu yang berkembang.” Ujar Elfriza Nicko

Hal ini juga dibuktikan dalam kegiatan yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional pada tahun 2019 hingga awal tahun 2020 terdapat kegiatan pendidikan politik yang diberi nama Sekolah Politik Amanat Nasional, program ini diperuntuhkan untuk masyarakat dan kader partai. Kegiatan ini diisi oleh pejabat – pejabat Partai Amanat Nasional maupun tokoh politik lainnya yang berasal dari eksternal Partai Amanat Nasional. Dalam kegiatan ini, PAN memprioritaskan kadernya untuk mengikuti program yang diharapkan bisa menghimpun banyak para milenial yang berada di ruang lingkup DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta. PAN sendiri juga membuat kegiatan ini terbuka untuk masyarakat luas, tidak hanya kader tertentu.

Program Sekolah Politik Amanat Nasional yang di inisiasi langsung oleh Divisi amanat institute yang berada di DPW Partai Amanat Nasional merupakan sebuah rangkaian pendidikan politik yang implementasinya telah terstruktur. Berikut penulis sajikan rangkaian roundup program kegiatan Sekolah Politik Amanat Nasional.

Tabel IV.A Program Pendidikan Partai Amanat Nasional 2019 – 2021

No.	Sesi	Tema	Pemateri
1	SESI 01	Nasionalisme, Patriotisme dan Kepemimpinan Bangsa	-Sigit Purnomo (Plt. Walikota Palu). -Zulkifli Hasan (Wakil Ketua MPR). -Fachry Ali (Pengamat Sosial Politik)
2	SESI 02	Dinamika Hukum dan Politik Berkeadilan di Indonesia	-Deni R. Sagara (Direktur Amanat Institute) -Jimly Asshiddiqie (Ketua MK 2003-2008) -Pangeran Khairul Shaleh (Pimpinan Komisi III DPR RI)
3	SESI 03	Filantropi dan Kolaborasi Anak Muda	-Imam B. Prasodjo (Sosiolog UI) -Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) -Hilman Latief (Ketua Lazismu)

4	SESI 04	Dunia Yang Berubah Pasca Pandemi	-dr. Irvan Herman (Ketua Departemen Koperasi BPP HIPMI) -M. Hanif Dhakiri (Menteri Ketenagakerjaan 2014-2019)
5	SESI 05	Indonesia Mengaji Moderasi	-H. Yandri Susanto, S.Pt (Ketua Komisi VIII DPR RI) -KH. Yahya Cholil Staquf (Ketua 'Aam PBNU) -Prof Dr.KH. Haedar Nashir, M.Si)
6	SESI 06	Kebijakan Publik Ramah Lingkungan Hidup	-Slamet Ariyadi, S.Psi (Anggota DPR RI Komisi IV) -Prof. Dr. Kuntoro Mangkusubroto, M.Sc. (Kepala Unit UKP4 2009-2014) -Muamar Vebry (Programme Manager for Climate Change European Union)

7	SESI 07	Kepemimpinan Politik Anak Muda Di Era Disrupsi	-Adnan Purichta Ichsan SH., MH (Bupati Gowa) -Athari Gauthi Ardi (Anggota DPR RI Komisi V) -M. Ridwan Kamil, ST., MUD (Gubernur Jawa Barat)
8	SESI 08	Kedaulatan Energi, Kedaulatan Ekonomi dan Kedaulatan Nasional	-Prof. Dr. (HC) Dahlan Iskan (Menteri BUMN (2011-2014)) -H. Eddy Soeparno, SH., MH. (Wakil Ketua Komisi VII DPR RI) -Prof. Dr. Didiik J. Rachbini (Ekonom INDEF)
9	SESI 09	Kebangkitan Ekonomi di Masa Pandemi	-Hj. Intan Fauzi, SH., LL.M (Anggota DPR RI Komisi IX) -Faisal H. Basri, SE., MA. (Ekonom INDEF)
10	SESI 10		-Hj. Zita Anjani, S.Sos., MSC. (Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta)

		Visi Kebangsaan Kebijakan Pendidikan Nasional	-Prof. Dr. Zainuddin Maliki, MSi. (Anggota DPR RI Komisi X) -Prof. Ainun Na'im, Ph.D. (Sekjend Kemendikbud)
11	SESI 11	Merumuskan Arah Geopolitik dan Geostrategi Indonesia Pasca Pandemi	-Dr. Nur Hasan Wirajuda (Menteri Luar Negeri Indonesia 2001-2009) -Dr. Muhammad Najib (Dewan Pakar DPP PAN) -Farah Puteri Nahila, B.A., MSc. (Anggota DPR RI Komisi I)
12	SESI 12	Bagaimana Anak Muda Masuk kedalam Partai Politik?	-Dr. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Hum., MA. (Ketua Fraksi PAN DPR RI) -Viva Yoga Mauladi, M.Si. (Waketum PAN) -Ahmad Yohan, M.Si (Ketum BM PAN)

Sumber : Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik

Program sekolah politik amanat disajikan oleh tim penyelenggara DPW Partai Amanat Nasional sebanyak 12 sesi, para peserta dapat mengikuti setiap sesi tersebut dengan cara bergabung ke link zoom yang telah disediakan dan diinformasikan oleh

para panitia penyelenggara. Peserta yang terdaftar dalam sekolah politik dapat bergabung dalam link zoom tersebut 10 menit sebelum sesi dimulai. Masing-masing sesi akan dipaparkan oleh para ahlinya dengan materi yang berbeda-beda, serta dalam pelaksanaan para peserta juga diberikan kesempatan untuk menanggapi atas materi yang telah dipaparkan. Bukan hanya menanggapi melainkan para peserta juga dapat memberikan pertanyaan kepada para ahlinya melalui kolom komentar yang dibuka atau dapat membuka kamera dan *microphone*.

A. Substansi Sekolah Politik DPW PAN DKI Jakarta

Dengan suatu komitmen yang dipunyai oleh Partai Amanat Nasional bisa meyakinkan bahwa partai yang bagus ialah partai yang dapat bawa pergantian untuk masyarakat serta pula berfungsi selaku edukator warga serta kandidat partainya. DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta diharapkan warga serta kandidat partai meningkat wawasannya dengan politik serta paham politik itu berjalan di negeri kerakyatan. Perihal itu di informasikan oleh Dimas Akbar Prakoso ataupun bersahabat dipanggil Dimas, berlaku seperti Ahli Ucapan Belia PAN. Dimas menerangkan kalau, pendidikan politik DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta dilatar belakangi alangkah berartinya untuk memberikan warga serta kandidat uraian mengenai politik ataupun rezim

“Ya kalo kita ngomongin kenapa alasan edukasinya ya taulah sarana edukasi itu ga hanya partai politik , tapi sekarang ada website, sosmed, televisi, dll. Tapi apa mungkin sarana - sarana seperti itu akan membahas lebih dalam? Kan engga biasanya pun hanya bersifat sekilas. Sedangkan kalo diselenggarakan oleh partai politik in ikan kita punya sarana diskusi bersama, kita bisa terjun lapangan langsung kondisinya seperti apa, permasalahan yang ada seperti apa, solusi

yang idealnya seperti apa. Karna memang gak setiap orang punya pemikiran yang sama, itu yang kita butuhkan disini untuk anak - anak muda, forum diskusi bersama. Masalah audiens mau jadi kader atau enngak itu urusan belakangan, yang kita tekankan disini adalah forum diskusi bersama, tanpa ada unsur mewajibkan untuk menjadi kader.”
Ujar Dimas Akbar selaku juru bicara muda PAN”.

B. Pengaruh Bonus Demografi di Era Disrupsi

Dengan adanya sebuah perkembangan zaman pada saat ini menjadikan sebuah tatanan negara dapat berubah mengikuti sebuah perkembangan tersebut. “Hasil riset yang dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada periode 2019-kuartal II/2020, bahwa jumlah para pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 23,5 juta atau 8,9%”, dengan hasil data tersebut membuktikan bahwa masyarakat di Indonesia menjadikan media social sebagai jenis penyebaran informasi atau konten yang paling sering digunakan (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) , 2020). Dengan adanya riset tersebut, membuktikan pada saat ini masyarakat banyak yang bertransformasi dari offline ke online.

Sebaliknya bersumber pada informasi yang diluncurkan oleh Badan Pusat Statistik(BPS) dalam tahun 2020, mengatakan jika masyarakat Indonesia dalam bulan September 2020 sebesar 270, 20 juta jiwa. Pada informasi itu mengatakan jika “kebanyakan masyarakat Indonesia didominasi oleh Generasi Z(lahir dalam tahun 1997– 2012) serta Generasi Milenial(lahir dalam tahun 1981– 1996). rasio Generasi Z sebesar 27, 94% dari keseluruhan populasi serta Generasi Milenial sebesar 25, 87%. Generasi ini tercantum pada umur produktif yang bisa jadi kesempatan buat

memesatkan perkembangan ekonomi. Persentase masyarakat umur produktif(15–64 tahun) kepada keseluruhan populasi dalam ketahui 2020 sebesar 70, 72%. Sebaliknya persentase masyarakat umur non- produktif(0–14 tahun serta 65 tahun ke atas) sebesar 29, 28 Persen di 2020. Persentase masyarakat umur produktif sebesar itu. membuktikan jika Indonesia sedang ada dalam masa bonus demografi. (<https://demakkab.bps.go.id/news/2021/01/21/67/hasil-sensus-penduduk-2020.html>)”.

“Karna kan emang kecenderungannya generasi muda ini terus bertambah apalagi didukung oleh bonus demografi kedepan, apalagi kita juga ga bisa boong lah partai politik itu kedepannya by data 2024 target audiensnya yang menyoblos pada Februari 2024 itu mayoritas hamper 60% Gen M dan Gen Z. sehingga itu ngebuat kita ini Gen Muda ga harus hanya sebatas tau aja, tapi juga harus paham betul apa yang dimaksud dengan politik, tujuannya apa, gimana ter libat dalam luberjurdil. Ini yang mau dibawa dalam sekolah politik selain menciptakan kader baru tapi juga ingin mengedukasi masyarakat secara luas, politik itu apa sih, fungsinya apa sih, harus nya seperti apa sih, politik yang bersih seperti apa, idealnya seperti apa, bukan sebatas memaksimalkan demografi tapi kita memang melihat semakin massif dari pertumbuhan anak muda ini semakin banyak ya mau ga mau kan kita juga sebagai bisnis, ketika marketnya anak muda tapi kita fokusnya masih ke orang2 dewasa jadinya ga relevan. Karna pada tahun 2024 nanti yang sudah saya bilang, 60% anak muda itu”. Ujan Valeryan Bramasta.

C. Program Pendidikan Politik di Era Disrupsi

Mengimplementasikan sebuah program yang dibentuk oleh DPW Partai Amanat Nasional berupa Sekolah Politik Amanat Nasional yang dilakukan dengan memanfaatkan media online berupa virtual memiliki sebuah tantangan, apa lagi waktu yang dijalankan pada program tersebut pada saat persebaran virus Covid-19 sedang marak tersebar dikalangan masyarakat. Biasanya pendidikan politik dilakukan oleh setiap partai politik disajikan dengan metode offline namun kini menjadi sebuah tantangan baru DPW Partai Amanat Nasional mengaplikasikan dengan metode online. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Dimas Akbar, ia menjelaskan bahwa dapat dipastikan dalam menjalankan program sekolah politik amanat dapat memenuhi kebutuhan anak muda terhadap politik. Baik berupa sarana maupun apa yang menjadi daya Tarik anak – anak muda.

“Sarana untuk Sekolah Politik AI kemarin memang karna kita melihat kondisi Pandemi, masa PSBB ga bisa kemana2, maka kami putuskan bahwa SPAI ini akan terus berjalan melalui alternatif virtual meeting Zoom. Apa ga takut ga gerak? Untuk itu kita disini buat daya Tarik untuk anak2 muda, kira2 apa sih yang lagi trend di anak muda atau kira2 anak muda nih Sukanya apa sih, kita berusaha tampilkan disini, supaya pembelajaran juga tidak terkesan kaku, tapi juga ada hiburannya.” Ujar Dimas Akbar.

D. Penyajian Materi Pendidikan

Penyelenggaraan program dengan materi yang disajikan dapat terlaksana karena adanya sebuah antusias dari para peserta yang mengikuti. Antusias yang ditunjukkan

oleh setiap peserta berbagai macam, salah satunya antusias yang ditunjukkan oleh peserta yang aktif mengikuti dengan cara aktif bertanya dalam setiap sesi yang diikuti, membuka kamera pada saat sesi materi sedang berlangsung dan aktif berdiskusi di dalam group WhatsApp yang telah di fasilitasi oleh pihak panitia. Hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu peserta yang mengikuti sekolah politik amanat.

“Dari peserta lain terlihat semuanya antusias, soalnya aku ngeliatnya dari peserta lain tuh banyak banget yang on-cam, dari situ aja udah keliatan kalo peserta-peserta ini tuh nyimak eventnya. Terus juga di kolom komentar tuh ada aja yang komen gitu entah ngobrol atau nanya jadi kesannya rame aja, mungkin kalo event nya ini live lebih asik lagi kali ya.” Ujar Ketrin sebagai salah satu narasumber yang mengikuti sekolah politik amanat.

Dengan menyelenggarakan program Sekolah Politik Amanat Nasional menjadikan sebuah inisiasi baru bagi partai politik dalam menjalankan tugas partai politik untuk memberikan sebuah pendidikan politik terhadap kalangan masyarakat. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti menemukan sebuah keterkaitan antara teori yang dikemukakan oleh Colin Mac Andrews dan Mochtar Mas' oed (1978), pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik dilakukan dengan memberikan sebuah pemahaman terhadap audiens.

Sedangkan pada unsur materi yang disajikan untuk para peserta program pendidikan merupakan wujud untuk mengembangkan suatu keilmuan dan kondisi yang berkembang untuk para pesertanya, khususnya generasi muda. Hal tersebut, dapat dianalisis oleh peneliti sebuah strategi literasi politik yang dilakukan oleh Partai Amanat Nasional. Strategi literasi politik merupakan salah satu hal penting dalam

suatu proses kehidupan demokrasi suatu negara. Apabila masyarakat dalam suatu negara kekurangan informasi serta minim pengetahuan mengenai isu- isu dalam dinamika perpolitikan yang terjadi di negaranya, maka bukan tidak mungkin masyarakat akan menjadi apatis dalam proses – proses demokrasi.

E. Pemanfaatan Media Dalam Menjalankan Pendidikan Politik

Dengan adanya perkembangan media yang massif menjadikan aktifitas manusia menjadi lebih mudah, begitu juga dengan adanya pemanfaatan media social yang pada saat ini banyak digunakan oleh seluruh kalangan. Media social pada saat ini juga sudah terdapat berbagai macam seperti Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn, WhatsApp dan lainnya. Namun dengan adanya perkembangan Covid-19 di seluruh dunia khususnya Indonesia memunculkan sebuah fenomena baru pada masyarakat, pemanfaatan salah satu media converance menjadi sebuah alternative masyarakat untuk berkomunikasi.

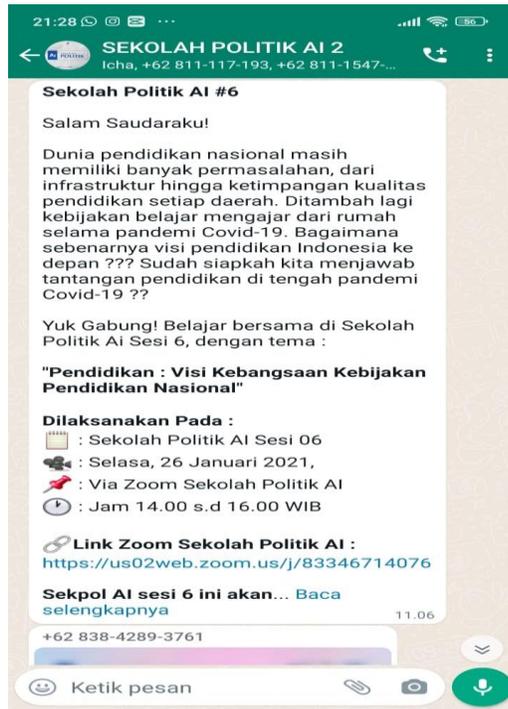
Partai politik menjadi salah satu bidang yang bisa beradaptasi mengikuti perkembangan zaman, begitu juga partai amanat nasional dalam keadaan keterbatasan aktifitas dalam kondisi *pandemic* Covid-19 PAN dapat mencoba menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan memanfaatkan media converance aplikasi Zoom. Persebaran Covid-19 tidak menjadi penghalang bagi PAN menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan pendidikan politik terhadap masyarakat.

Pemilihan aplikasi Zoom dalam program pendidikan politik dikarenakan aplikasi zoom sangat memungkinkan untuk melakukan rapat atau kegiatan dengan metode panggilan video walaupun pada awalnya Zoom diterbitkan untuk mempermudah kegiatan belajar mengajar siswa. Seperti hal yang dikatakan oleh Eric Yuan selaku CEO Zoom. Penting bagi siswa untuk terus belajar, meskipun sekolah

diliburkan. Di Play Store, Zoom Cloud Meeting setidaknya telah di unduh lebih dari 10 juta pengguna dengan rating 2.4. Selain itu, adapun sisi positif dan negatif dari aplikasi tersebut. Sisi positif yaitu, zoom cloud meeting bukan hanya mampu melakukan panggilan video satu lawan satu, tetapi juga dalam sebuah grup yang beranggotakan sampai 100 orang (Irawan, 2021).

Pada kali ini PAN melaksanakan pendidikan politik dengan cara berbeda dari tahun sebelumnya, pertama PAN memanfaatkan media social Instagram yang dimiliki hingga saat ini untuk mempromosikan program yang akan dilaksanakannya, selanjutnya PAN memanfaatkan sebuah fitur google yang pada saat ini dikenal dengan google form melalui fitur google tersebut panitia penyelenggara akan mengkordinasikan masyarakat yang mendaftarkan dirinya dalam program pendidikan politik dan fungsi pemanfaatan fitur google tersebut nantinya akan mempermudah panitia untuk mengundang para peserta ke dalam group WhatsApp.

Melalui group WhatsApp yang disediakan oleh tim panitia para peserta akan mendapatkan sebuah informasi tentang program pendidikan politik yang akan dilaksanakan. Informasi utama dalam group WhatsApp tersebut nantinya para peserta akan mendapatkan link video convrance zoom, setelah link tersebut telah diinformasikan melalui WhatsApp group, para peserta akan mudah untuk bergabung kedalam room yang telah disiapkan oleh penyelenggara dalam hal ini PAN.



Gambar 3 Sumber : Grup Whatsapp Sekolah Politik AI

WhatsApp tidak hanya difungsikan untuk memberikan sebuah informasi tentang link zoom yang nantinya akan digunakan oleh para peserta dalam setiap sesinya. Fungsi WhatsApp group yang difasilitasi oleh tim penyelenggara juga untuk memberikan ruang kebebasan untuk seluruh peserta berdiskusi, ngobrol atau menjalin relasi antar peserta. Walaupun pada kali ini pendidikan politik dilakukan secara online karena adanya persebaran Covid-19, antusias masyarakat khususnya generasi muda sangat banyak dan semangat. Berdasarkan hal tersebut PAN walaupun dalam kondisi pandemic serba adanya keterbatasan tidak menghalangi sebuah tugas dan tanggung jawabnya melakukan pendidikan politik kepada masyarakat khususnya generasi muda.

F. Dampak Pendidikan Politik di Era Disrupsi

Adanya perubahan dari offline ke online menjadikan para pengurus dalam Sekolah Politik Amanat memiliki tantangan dalam mengimplementasikannya. Namun tantangan yang dialami selama proses program berlangsung tidak menjadi sebuah penghambat program Sekolah Politik Amanat berlangsung. Seperti hal yang dijelaskan oleh Dimas Akbar bahwa dalam mengimplementasikan program memang ada tantangan tersendiri bagi DPW Partai Amanat Nasional karena baru kali ini kita bertransformasi menyediakan pendidikan politik secara online untuk para kader dan masyarakat khususnya anak muda.

“Pada waktu program berjalan ya memang ada tantangan, tantangannya karena online jadi kita terbentur dengan kegiatan para peserta yang lainnya. Para peserta mengikuti kegiatan itu bisa dimana saja ya, karena memang metodennya online nah karena itu menjadi tantangan kami. Kami tidak tau kegiatan selain mengikuti proses pendidikan itu apa saja. Jadi kadang banyak peserta yang tidak konsisten mengikuti dari awal sesuai rundown yang panitia sudah informasikan” Ujar Dimas pada saat menjelaskan tantangan yang dihadapi pada saat melakukan pendidikan politik”.

Dari sebagian wawancara diatas dapat diamati terdapat sebagian perihal yang melatarbelakangi DPW PAN DKI Jakarta melangsungkan program Pendidikan politik. Pertama, DPW PAN DKI Jakarta ingin warga serta kadernya pintar dalam politik, bukan tidak bisa jadi pada pendidikan politik yang dicoba suatu partai politik, tidak bermaksud buat mencerdaskan. Ini ialah kerangka balik penting DPW

PAN DKI Jakarta melangsungkan program Pendidikan politik, supaya warga besar dapat memiliki pengetahuan seluas– luasnya dibidang politik.

Kedua, DPW PAN DKI Jakarta mengadakan program Pendidikan politik ini sekaligus untuk konsolidasi penguatan kader mereka. Dalam hal ini, Pendidikan yang dilakukan oleh DPW PAN DKI Jakarta adalah mempersiapkan kadernya untuk pertarungan politik. *Ketiga*, latar belakang DPW PAN DKI Jakarta mengadakan program ini tidak lain karena DPW PAN DKI Jakarta mendukung program pemerintah yang berisi mencerdaskan bangsa juga kader. Dengan adanya Undang – Undang No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, DPW PAN DKI Jakarta menjalankan fungsinya sebagai partai dan membantu pemerintah dalam memberikan Pendidikan politik.

Dengan begitu pendidikan politik yang sudah dilakukan oleh DPW Partai Amanat Nasional dengan membuat Sekolah Politik Amanat dengan cara online ini cocok dengan filosofi yang dikemukakan oleh Colin Mac Andrews serta Mochtar Abang' oed(1978) kalau melaksanakan pendidikan politik bisa dijalani melewati bermacam berbagai alat salah satunya yakni dengan metode menggunakan alat massa. Melewati alat massa dengan memakai cara online virtual dengan cara literal dengan menggunakan alat Partai Amanat Nasional bisa membagikan data mengenai peristiwa-peristiwa politik, alat massa pula mengantarkan langsung ataupun tidak langsung terpaut nilai- nilai penting yang dianut oleh warga(Wanna, 2017).). Sebab itu sistem alat massa yang bertanggungjawab ialah alat kokoh pada membuat keyakinan-keyakinan politik.

2. Materi Pendidikan Politik Sekolah Amanat Nasional

Kesiapan yang dilakukan pada Partai Amanat Nasional dalam membuat program pendidikan politik untuk generasi muda memiliki kesiapan yang matang. Kesiapan yang disajikan dalam program dapat terlihat dari materi-materi yang disajikan oleh tim DPW Partai Amanat Nasional, materi yang disajikan tidak melilih terkait dengan edukasi Pemilu namun terdapat materi terkait tentang nasionalisme, patriotism dan kepemimpinan bangsa.

A. Nasionalisme dan Patriotisme

Nasionalisme serta patriotisme ialah ialah sesuatu penafsiran yang besar, sehingga pada kondisi ini mengenai patriotisme bisa dimaksud selaku jiwa bangsa Indonesia yang hendak lalu menempel sepanjang bangsa Indonesia sedang terdapat, identitas patriotisme antara lain cinta dalam Tanah Air, bahasa ataupun asal usul adat bersama dan sesuatu kemauan hendak kebebasan politik, keamanan serta reputasi bangsa.

Masing-masing materi yang disajikan untuk para peserta akan disampaikan oleh beberapa tokoh politik. Tokoh politik yang akan menjadi narasumber ialah para tokoh yang ahli dalam bidangnya masing-masing, seperti Bapak Zulkifli Hasan, pada saat itu beliau sebagai wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat diundang oleh panitia sebagai pengisi materi, Dalam Sekolah Politik Amanat dalam sesi 1 dengan materi nasionalisme, patriotism, dan kepemimpinan bangsa, hal tersebut juga disampaikan oleh salah satu peserta yang telah mengikuti program dan dapat dilihat dalam flyer acara yang penulis sajikan dibawah ini.

“Banyak ya waktu itu, contohnya ada di kalangan pengusaha, ada juga di kalangan pejabat, dll. Mereka semua yg jadi pemateri adalah yang ahli di bidangnya masing-masing.” Ujar Winda mahasiswa UNSIKA yang menjadi peserta dalam program sekolah politik amanat.



Gambar 4 Sumber : dari Zoom pada saat berlangsung kelas bersama Bapak Zulkifli Hasan



Gambar 5 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional

Penentuan materi nasionalisme dalam sekolah politik yang diselenggarakan oleh pihak DPW Partai Amanat Nasional ialah suatu observasi dalam di masa dikala ini yang mana wajib bisa memuat serta menanggapi tantangan era peralihan pada bermacam pergantian situasi yang pastinya nilai-nilai terkini tidak bisa mengguncangkan patriotisme sepanjang bangsa Indonesia konsisten mempunyai rasa mempunyai negeri Indonesia. Semacam perihal yang di informasikan oleh Rully Pahlawan berlaku seperti badan pelaksana Sekolah Politik Amanat serta Kandidat PAN.

“Kalo di SPAN materi ya yang berkaitan dengan isu-isu politik, perekonomian bangsa juga bagaimana cara nya supaya anak-anak milenial bisa berpikir kritis, berpikir rasional dalam mengawasi kebijakan-kebijakan

pemerintah”

Banyak tokoh – tokoh bangsa yang orasinya penuh dengan gagasan serta narasi besar. Namun, sekarang di media social narasi yang terbangun justru penuh dengan kebencian sehingga saling menyakiti satu sama lain. Nilai – nilai patriotism, nasionalisme dan kepemimpinan ini bisa menjadi prinsip ditengah suasana dan akses informasi terbuka, pemerintah cenderung lambat soal informasi sehingga masyarakat lebih percaya informasi yang bersumber dari luar pemerintah. Oleh karenanya, di era informasi ini semua harus bisa mengakses internet dan didukung infrastruktur yang baik untuk pemberitaan dan informasi lebih baik.

B. Filantropi dan Zakat

Melalui zakat, infak, sedekah, wakaf, infak, dan amal lainnya, umat Islam dapat sepenuhnya mengekspresikan potensi dermawan mereka. Organisasi filantropi bukan untuk mencari keuntungan dan tidak bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari layanan yang mereka berikan. Inti dari pembentukan organisasi amal adalah untuk memastikan kesejahteraan penerima manfaat meningkat dalam jangka panjang dengan cara yang berkelanjutan, yang berarti bahwa program yang didanai oleh organisasi tidak akan dihentikan begitu kebutuhan mendesak mereka terpenuhi. bertemu.

Dalam ekonomi Islam, zakat, infaq, dan sedekah digunakan untuk mencapai pemerataan sumber daya. Potensi uang zakat yang sangat besar ini akan memberikan efek yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan, jika dikelola secara bertanggung jawab dan kompeten. Dengan distribusi zakat yang baik, daya beli masyarakat meningkat, dan ketimpangan pendapatan berkurang. Redistribusi

pendapatan dan transfer kekayaan adalah dua cara di mana zakat dan sedekah berkontribusi untuk memerangi kemiskinan. Investasi jangka panjang di bidang-bidang seperti perawatan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pekerjaan dimungkinkan oleh zakat (Saripudin, 2016).



Gambar 6 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional

Bisa kita lihat dalam kutipan yang disampaikan oleh Aqib Ardiansyah (Wakil Rektor Univ. Peradaban 2014-2018. Beliau mengatakan Kita lihat kadang kelompok filantropi bersifat jangka pendek dan spontanitas. Bagaimana bisa dikolaborasikan dan berdampak Panjang signifikan pada perubahan bangsa ini? seperti yang kita ketahui bahwa di Indonesia inibanyak Lembaga filantropi yang menggalang amal, zakat, dan sebagainya. Namun, sayangnya hal tersebut hanya dilakukan secara spontanitas, misalnya hanya terjadi pada saat terjadi bencana alam. Seharusnya hal tersebut terus dilakukan berkepanjangan supaya hal – hal tersebut bisa dikolaborasikan dengan anak muda yang ada di Indonesia, khususnya di era bonus demografi ini jumlah anak muda menduduki posisi mayoritas.

C. Kondisi Negara Disaat Kondisi Pandemi Covid-19

Sederhananya, tahun 2020 termasuk di antara tahun-tahun tergelap dalam sejarah umat manusia. Ketika virus corona pertama kali muncul, itu mengguncang seluruh dunia yang berteknologi maju. Tahun ini juga merupakan tantangan terbesar bagi komunitas medis karena berupaya memperluas kemampuannya dalam menghadapi krisis kesehatan global yang meningkat. Kemajuan medis mungkin tidak selalu menghalangi pembentukan penyakit baru, seperti yang ditunjukkan oleh Corona.

Akibat virus corona, upaya global untuk memperbaiki ekonomi, kondisi manusia, dan kesehatan menjadi lebih rumit dari yang seharusnya. Setiap negara berupaya menahan pandemi yang melanda wilayah mereka. Awalnya melibatkan variasi barang yang lebih luas, perdagangan telah menyempit dalam beberapa tahun terakhir untuk fokus pada APD seperti masker dan kacamata. Ini menunjukkan bahwa dunia modern tidak siap untuk menangani masalah baru, atau mungkin menunjukkan bahwa semakin maju dunia, semakin maju juga ancaman.a



Gambar 7 Sumber : Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional

Penulis yakin bahwa arah kemajuan global akan bergeser drastis begitu pandemi global virus corona berhenti. Ini karena orang-orang di korona dikondisikan untuk menghindari kontak fisik, bersosialisasi secara online daripada secara langsung, dan umumnya menjaga jarak satu sama lain. Langkah selanjutnya adalah penerapan teknologi yang lebih mutakhir di semua bidang aktivitas manusia, yang dimungkinkan oleh hal ini. Didukung oleh adopsi big data yang meluas untuk memajukan TI dan interkomunikasi, internet akan terus berkembang. Teknologi akan menembus setiap aspek keberadaan manusia, dari perdagangan dan pendidikan hingga perawatan kesehatan.

Teknologi terkait perdagangan, seperti pengiriman drone, juga akan berkembang pesat. Perdagangan difasilitasi, dan penyebaran penyakit berkurang, dengan mengurangi jumlah waktu yang dihabiskan orang dalam jarak dekat satu sama lain. Alat deteksi penyakit yang ditingkatkan dan kemajuan teknologi lainnya dalam industri perawatan kesehatan akan sangat membantu dokter dalam pekerjaan sehari-hari jika digunakan dengan benar.

Setelah pandemi virus corona berakhir, planet ini akan mengalami transformasi dramatis dalam hal pembangunan. Jika suatu negara harus mengimpor untuk memenuhi kebutuhan rakyatnya, negara itu pada akhirnya akan berusaha menghasilkan apa yang dibutuhkan rakyatnya sendiri. Karena itu, negara dapat menjadi mandiri tanpa melakukan outsourcing manufakturnya. Sebagai bonus tambahan, ini akan memudahkan proses distribusi di dalam negara itu sendiri, mengatasi masalah seperti pemerataan kebutuhan masyarakat, memfasilitasi konektivitas perdagangan lokal, dan memperkuat hubungan antar wilayah dalam suatu negara untuk meningkatkan keterlibatan komersial. Kebijakan Publik Ramah Lingkungan Hidup

Mengingat pentingnya memelihara planet yang layak huni untuk kelangsungan hidup manusia, perlindungan lingkungan telah menjadi agenda internasional teratas. Kepedulian dari satu kelompok saja tidak cukup, karena perubahan lingkungan memiliki konsekuensi yang luas yang tidak dapat ditampung di tingkat nasional atau bahkan regional. Pengelolaan lingkungan untuk tujuan melestarikan kapasitas lingkungan adalah tugas semua manusia dan setiap pemerintah di dunia, seperti yang ditegaskan pada "*United Nations Conference on the Human Environment*, yang diselenggarakan di Stockholm dari 5-16 Juni 1972".

Pada tahun 1982 Indonesia mengeluarkan undang-undang yang sangat penting mengenai pengelolaan lingkungan hidup, yaitu : Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (filosofinya bertumpu pada “hukum lingkungan sebagai payung”), yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPLH) (filosofinya

bertumpu pada “pengelolaan”) (Tijow, 2017).

Pemerintah Indonesia mengesahkan undang-undang lingkungan yang penting pada tahun 1982, dan bunyinya sebagai berikut: “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan- Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (filosofinya bertumpu pada hukum lingkungan sebagai payung), yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup/UUPLH) (filosofinya bertumpu pada pengelolaan)” (Tijow, 2017).



Gambar 8 Sumber : Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional

Sebagai pencerminan arah terkini yang didapat oleh penguasa Indonesia, penentuan kepala negara diadakan buat awal kalinya dalam tahun 2004 serta Susilo Bambang Yudhoyono serta Jusuf Kalla tersaring tiap- tiap buat mendiami posisi kepala negara serta delegasi kepala negara. Peraturan Kepala negara No 7 Tahun 2005 dikeluarkan oleh Kepala negara Susilo Bambang Yudhoyono dalam era kepresidenannya, terpaut dengan Konsep Pembangunan Waktu Menengah Nasional 2004–2009. Kenaikan akses warga

miskin kepada pengelolaan serta penggunaan area hidup serta basis energi alam digapai melewati sebagian program yang berlainan, sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan Presiden No. 7 Tahun 2005, Pasal 8, Ayat 2 (Pemenuhan Hak atas Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam) (Supriadi, 2008).

Dengan mengubah, merehabilitasi, dan menghemat penggunaan melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, serta memanfaatkan sumber daya alam, kita dapat lebih menyadari potensi lingkungan dan sumber daya alam, yang penting untuk melakukan pengelolaan lingkungan demi kelestarian keharmonisan dan kemampuan lingkungan yang seimbang untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. sumber daya alam untuk sebesar- besar kejayaan orang, dengan mencermati proteksi cara serta penyeimbang ekologis, menekan pembangunan berkepanjangan, memajukan kebutuhan ekonomi serta adat warga setempat, serta penerapan aturan ruang yang diamanatkan dengan cara hukum.

D. Kepemimpinan Anak Muda di Era Disrupsi

Dengan adanya sebuah perubahan yang begitu massif saat ini terlahir dari sebuah pemikiran manusia tentang kehidupannya. Setiap manusia memiliki anugrah untuk dapat berpikir, dan memiliki akal budi namun setiap manusia tersebut tidak sama pemikirannya. Menurut (Bairizki, 2021) mengatakan bahwa perubahan merupakan sebuah hal yang terjadi tanpa diprediksi, perubahan tidak dapat dipungkiri terdapat sebuah resiko atas bergantinya waktu. Disrupsi merupakan sebuah inovasi yang muncul dari adanya perubahan dari sistem lama ke sistem baru berupa teknologi yang lebih efisien dan berguna (Kasali, 2018).



Gambar 9 Sumber: Dokumentasi Sekolah Politik Amanat Nasional

Materi kepemimpinan politik anak muda di era disrupsi ini dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2020 pada pukul 14.00-16.00, dalam sesi pemaparan materi kali ini dilakukan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat Muhammad Ridwan Kamil ST, MUD., anggota DPR RI Komisi v Ibu Azhari Gauthi Ardi dan yang terakhir ada Bupati Gowa bapak Adnan. Ridwan Kamil dalam sesi ini juga menjelaskan tentang pandangannya mengenai peluang anak muda dalam memimpin di era disrupsi.

Adanya era disrupsi pada saat ini menjadi sebuah peluang anak muda untuk bergerak lebih banyak yang dapat menghasilkan sebuah inovasi baru. Disrupsi kepemimpinan akan mengubah cara pikir dan cara kerja seseorang pemimpin karena adanya sebuah perubahan dan perkembangan teknologi serta kehidupan akan lebih mudah praktis dan efisien” Ujar Ridwan Kamil dalam menyampaikan pandangannya terkait materi.

Dalam sesi ini terdapat pula peserta yang menyampaikan sebuah pertanyaan kepada narasumber yang hadir pada akhir sesi pemaparan materi. Peserta tersebut menanyakan terkait dengan apakah dalam era disrupsi pemimpin daerah dapat terbantu dengan adanya sebuah inovasi baru berupa teknologi?. Pertanyaan tersebut dijawab oleh Bupati Gowa bapak Adnan Purichta Hasan, S.H, M.H.

“Sebagai pemimpin daerah saya merasakan kebermanfaatannya dengan hadirnya disrupsi ini. Tidak dapat dipungkiri kita sebagai pemimpin daerah harus melek akan perubahan yang ada, kalau kita tidak bisa menerima atau mengikutinya tentu nantinya akan ketinggalan zaman yang dampaknya menyebabkan adanya ketertinggalan informasi pada warga. Kalau kita memanfaatkan digital juga akan membantu pekerjaan kita sebagai pemimpin untuk melakukan sosialisasi atau sekedar memberikan informasi untuk warga”.

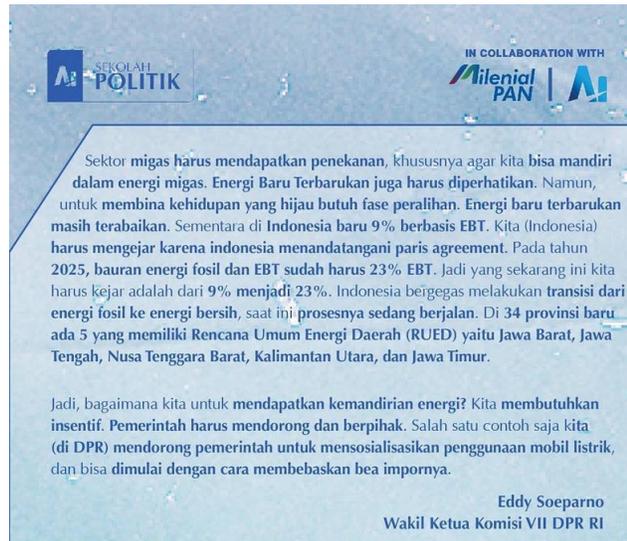
Tidak ada perbedaan pada sesi materi kepemimpinan Anak Muda Pada Era Disrupsi dengan sesi materi yang lainnya. Hanya saja pada setiap sesi itu disampaikan oleh narasumber yang berbeda-beda. Namun dalam setiap sesi DPW PAN DKI Jakarta mengharapkan materi materi yang diberikan itu akan sampai kepada para peserta dengan baik.

E. Kedaulatan Energi, Ekonomi dan Kedaulatan Nasional

Kedaulatan energi merupakan “hak sesuatu negara serta bangsa untuk selaku mandiri memastikan kebijaksanaan pengelolaan tenaga guna menggapai daya tahan serta independensi tenaga”. Arti ini menerangkan kalau Indonesia

dianggap selaku suatu negeri yang mempunyai independensi tenaga nasional apabila kebijaksanaan nasional terpaut dengan tenaga serta tatakelolanya direncanakan, terbuat serta dilaksanakan dengan cara mandiri ialah tidak terdapat ketergantungan, infiltrasi, serta tekanan- tekanan dari daya eksternal bagus negeri ataupun lembaga- lembaga ataupun kelompok lain (Sampe, 2016).

Sedangkan yang diartikan dengan ketahanan energi nasional merupakan“ sesuatu situasi terjaminnya ketersediaan tenaga, akses warga kepada tenaga dalam harga terjangkau(logis) pada waktu jauh dengan konsisten mencermati proteksi kepada area hidup.” Daya tahan tenaga merupakan suatu cerminan hingga sejauhmana tenaga bisa diadakan dengan cara pas durasi serta aman ketersediaannya dengan harga yang terjangkau serta kualitas yang bisa diperoleh. Penanda yang dipakai buat mendeskripsikan daya tahan tenaga antara lain (1) jumlah tenaga (availability) bagus basis energi ataupun persediaan tenaga, (2) ketersediaan prasarana(accessibility), (3) harga tenaga(affordability), (4) mutu tenaga(acceptability), dan (5) portofolio ataupun bauran tenaga(tenaga mix). Disamping itu daya tahan tenaga pula memiliki elemen (6) keberlanjutan(sustainability), sehingga tenaga dituntut untuk diatur dengan mencermati energi area (environment).



Gambar 10 Sumber: Dokumentasi Sosial Media Sekolah Politik Amanat Nasional

Independensi energi merupakan hak semua orang, bangsa serta Negeri buat memutuskan kebijaksanaan tenaga, tanpa aduk tangan Negeri lain. Independensi tenaga melingkupi investigasi serta penciptaan tenaga yang lumayan serta menyeluruh; melaksanakan penganekaragaman supaya ada banyak opsi tenaga; tercantum tenaga terkini terbarukan; dan melaksanakan pelestarian tenaga, kemampuan pemanfaatannya buat menjamin keberlangsungan ketersediaan tenaga untuk warga.

Upaya untuk itu sebenarnya telah dilakukan. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi yang menjadi acuan dalam pengelolaan energi nasional. Pengelolaan energi ini meliputi penyediaan, pemanfaatan dan pengusahaannya harus dilakukan secara terus menerus guna meningkatkan kesejahteraan rakyat dan dalam pelaksanaannya harus selaras, serasi dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. UU Energi memiliki keterkaitan dengan banyak UU yang terkait dengan sektor energi dan

lingkungan diantaranya UU Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, UU Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba, UU Nomor 6 Tahun 1994 tentang Ratifikasi Konvensi Perubahan Iklim, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Rahman Z. , 2015).

F. Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan merupakan hak setiap warga negara yang harus dilaksanakan oleh pemerintah dalam kondisi apa pun agar tujuan pendidikan nasional dapat tercapai. Sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 3 disebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah: Berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Secara ideal rumusan tujuan pendidikan nasional kita sudah mencerminkan tiga domain yakni meliputi domain afektif, psikomotor, dan cognitive (Datuk, 2020).

Mewujudkan tujuan pendidikan ini membutuhkan sistem yang memastikan semua siswa memiliki akses ke kesempatan belajar yang konsisten. Personil di bidang pendidikan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa siswa memiliki akses ke kesempatan belajar yang efektif.

Meski terjadi pandemi global, pendidikan harus tetap berjalan seperti biasa. Dalam mewujudkan sosok manusia masa depan dan membangun landasan nilai-nilai tersebut di benak generasi muda bangsa, pendidikan merupakan proses tanpa akhir yang harus tetap konstan untuk mencapai keunggulan berkelanjutan (Imanudin, 2020).

Dalam jangka panjang, kualitas sumber daya manusia (dalam hal kecerdasan, emosi, dan motivasi) dapat menurun jika proses pembelajaran terganggu oleh pandemi. Oleh karena itu, banyak pihak, terutama pemerintah, perlu bekerja sama agar pendidikan dapat berjalan normal di tengah meluasnya penyebaran virus Covid-19. Belajar dan mengajar harus dilanjutkan, dan akses siswa ke pendidikan harus dilindungi dengan segala cara. Sebagai tempat pembelajaran, sekolah perlu bereaksi cepat terhadap pandemi COVID-19 dengan melakukan upaya yang konsisten dan terpadu untuk memastikan pembelajaran dapat berlangsung seefisien mungkin.

Di tengah pandemi, pemerintah yakni Mendiknas telah menyusun strategi pendidikan dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 15 Tahun 2020 dengan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah (BDR) di masa darurat penyebaran Covid-19. Di masa darurat penyebaran virus corona, siswa tetap dapat memenuhi haknya untuk mendapatkan layanan pendidikan dengan mengikuti program belajar jarak jauh (PJJ). Proses pembelajaran jarak jauh menghasilkan seperangkat strategi pembelajaran yang dapat diimplementasikan melalui sarana online, offline, atau hybrid (Nurina, 2021) Proses Belajar dari Rumah dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: (SE Medikbud, 2020). Berikut adalah parameter penerapan *Learning at Home*: (SE Medikbud, 2020).

- a) Dengan siswa belajar dari rumah melalui pembelajaran daring/jarak jauh adalah untuk memberi mereka akses ke pengalaman belajar yang bermakna tanpa tekanan untuk memenuhi persyaratan kurikuler yang ketat untuk naik kelas atau lulus;

- b) Pendidikan kecakapan hidup, terutama yang terkait dengan wabah Covid-19, mungkin menjadi mata pelajaran utama untuk belajar di rumah.
- c) Siswa yang berpartisipasi dalam Pembelajaran Terdistribusi dapat menyesuaikan rencana belajar dan tugas pekerjaan rumah mereka dengan minat dan keadaan unik mereka sendiri, seperti kurangnya ruang belajar yang sesuai di rumah;
- d) Guru memberikan umpan balik kualitatif yang bermanfaat tentang bukti atau barang apa pun yang dibuat sebagai bagian dari kegiatan Belajar dari Rumah, alih-alih memberikan skor atau nilai numerik.

BAB V

DAMPAK PENDIDIKAN POLITIK SEKOLAH AMANAT NASIONAL

Dalam bab ini akan dijelaskan terkait dengan dampak yang di dapatkan secara langsung dan tidak langsung oleh para peserta program sekolah politik amanat pendidikan politik yang telah diselenggarakan oleh pihak DPW Partai Amanat Nasional. Selanjutnya data lapangan yang dijasikan penunjang dalam penulisan pada bab ini diambil melalui proses wawancara dan observasi dan dokumenliterature yang sesuai. Kemudian akan dilakukan analissi terhadap data tersebut menggunakan teori yang relevan agar menjadi suatu penulisan yang sistematis dan komperhensif.

1. Dampak Sekolah Politik Amanat Nasional Bagi Peserta

A. Dampak Bagi Peserta

Pendidikan politik merupakan suatu upaya sadar yang dilakukan antara pemerintah dan para anggota masyarakat secara terencana, sistematis, dan dialogis dalam rangka untuk mempelajari dan menurunkan berbagai konsep, simbol, nilai-nilai, dan norma-norma politik dari satu generasi ke generasi selanjutnya. Manfaat pendidikan politik dapat melatih warganegara agar meningkat partisipasi politiknya. Lewat pendidikan politik individu diajarkan bagaimana mereka mengumpulkan informasi dari berbagai media massa, diperkenalkan mengenai struktur politik, lembaga-lembaga politik, lembaga-lembaga pemerintahan.

Pendidikan politik adalah proses untuk membina individu agar mampu memahami, menilai, dan mengambil keputusan tentang berbagai permasalahan dengan cara-cara yang tepat dan rasional, termasuk dalam menghadapi masalah yang bias maupun isu yang

kontroversial. Pengetahuan politik akan membawa orang pada tingkat partisipasi tertentu. Dalam politik seseorang tidak hanya dituntut mengembangkan pengetahuan, melainkan juga harus mengembangkan aspek sikap dan keterampilan. Bagi generasi muda, pendidikan politik menjadi sangat penting dikarenakan generasi muda memiliki peranan yang sangat besar untuk memberikan partisipasi politik yang tinggi.

Pasca reformasi, keikutsertaan warga negara dalam arena politik menampakkan gejala kelesuan yang diindikasikan pada penurunan kualitas serta kuantitas partisipasi politik. Dalam pelaksanaan pemilihan umum misalnya. Di beberapa daerah di Indonesia masih bermasalah terkait tingginya tingkat golongan putih (golput) akibat ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja partai politik maupun figur yang ditawarkan. Pelaksanaan partisipasi politik masih terancam penggunaan politik uang (*money politics*) dalam mempengaruhi proses pemilihan seseorang. Untuk menangani semua permasalahan tersebut pemerintah harus mengurangi angka golput, memberikan sanksi tegas pihak *money politics*, sehingga kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan figur pemimpin turut meningkat. Seperti yang kita ketahui, generasi milenial memiliki potensi yang besar bagi kekuatan politik karena jumlahnya yang banyak. Namun, generasi ini kurang tertarik terlibat partisipasi dalam politik secara konvensional karena berbagai alasan.

Perlu adanya jalur yang lebih mudah untuk diakses supaya generasi milenial mau untuk berpartisipasi dalam perpolitikan. Contohnya seperti melalui tulisan di media internet yang bertemakan politik. Generasi milenial yang baru belajar mengenai politik,

khususnya dalam pemilihan umum biasanya mereka belajar tidak jauh dari ruang yang dianggap memberi rasa kenyamanan dalam diri mereka. Perilaku generasi milenial sebagai pemilih pemula dalam demokrasi memiliki karakteristik yang biasanya labil dan apatis

2. Manfaat Sekolah Politik Amanat Nasional Bagi Partai Politik

A. Bertambahnya Jumlah Anggota Baru

Tidak dapat dipungkiri dalam program yang diselenggarakan oleh DPW Partai Amanat Nasional memiliki dampak positif bagi internal partai politik. Banyaknya peserta yang mengikuti kegiatan sekolah politik amanat menjadi sebuah ajang partai politik amanat melakukan marketing terhadap partainya kepada seluruh peserta yang mengikuti. Salah satu yang menjadi dasar setiap organisasi atau partai politik ialah adanya sebuah regenerasi, adanya regenerasi dilakukan perlu juga adanya sebuah kaderisasi yang dilakukan oleh setiap organisasi atau partai politik. Setiap kader yang bergabung perlu meyakini nilai-nilai bersama sebagai pembentuk watak dan karakteristik organisasi (Haris, 2020)

Setiap partai politik memiliki cara masing-masing dalam membentuk kaderisasi untuk menciptakan adanya regenerasi pada tubuh partai, sebagai contoh DPW Partai Amanat Nasional dalam program sekolah politik amanat memberikan sebuah peluang bagi para peserta yang mengikutinya. Seperti hal yang disampaikan oleh Rafli Rivandhi selaku Wakil Sekretaris Bid. Pendidikan terkait dengan peluang kebebasan yang diberikan oleh partai amanat untuk seluruh peserta yang mengikutinya.

“Terkait program kita memberikan sebuah kebebasan untuk para peserta, jadi panitia akan mengembalikan ke masing-masing pribadi mereka, jika mereka ingin berkarir disini ya bisa, jika mereka aktif disini juga kita nanti ada jenjang selanjutnya, dan juga kita nanti tawarkan program untuk 2024 yaitu mereka bisa menjadi saksi dari pemilu PAN, nanti kita beri arahan dan pembelajarannya, tanpa ada unsur paksaan”. Ujar Rafli Rivandhi selaku Wakil Sekretaris Bid. Pendidikan

Penjelasan yang disampaikan oleh Rafli Rivandhi selaku Wakil Sekretaris Bid. Pendidikan, dikuatkan kembali dengan penjelasan yang diberikan oleh Elfriza Nicko Saputra selaku Wakil Sekretaris Bid. Pendidikan Amanat Institute, Nicko menjelaskan bahwa dalam program sekolah politik memang terdapat niat untuk menjaring dan merangkul anak muda untuk berproses politiknya bersama PAN, penjelasan tersebut sebagai berikut :

“mungkin jujur aja kepentingannya ga jauh2 dari bonus demografi tadi yaitu kita ingin menjaring dan merangkul generasi muda ini untuk melanjutkan perjuangan Bersama kader – kader PAN lainnya, tapi balik lg ke merekanya apakah mereka teteap mau berjuang Bersama Pan atau tidak, karna ga bisa dipungkiri bahwa saat ini yang bertujuan seperti kami ga hanya PAN, banyak

partai yang diluar sana yg juga ingin meregenrasi anak muda, namun dengan caranya masing-masing”



Gambar 9 Sumber : Dokumentasi Nadya Riska Maharani

Peneliti juga telah melakukan proses wawancara kepada salah satu peserta sekolah politik yang diselenggarakan oleh partai amanat nasional, dalam proses wawancara peserta menjelaskan bahwa awal mula mengikuti sekolah politik yang dilakukan oleh PAN itu hanya sekedar ingin menambah ilmu serta mengetahui perkembangan politik pada era saat ini. Peserta tersebut bernama Nadya, Nadya menjelaskan dirinya pada akhir sesi program mencoba menghubungi salah satu panitia untuk menanyakan terkait PAN, Nadya juga menjelaskan bahwa dirinya mencoba bergabung menjadi anggota PAN namun disayangkan bahwa proses bergabung

sebagai anggota tidak ada penyingkiran atau program khusus ketahap lanjutnya.

Pola kaderisasi menurut Azwar (2008) segala aktivitas partai mulai dari pengenalan partai secara mandiri, penerimaan anggota. Melihat pola kaderisasi dalam program sekolah politik yang dilakukan oleh PAN belum terlihat secara detail, terintegrasi, terencana dan berkesinambungan untuk melakukan jenjang perkaderan yang dapat menjangkau semua peserta yang berniat untuk berproses di PAN. Proses kaderisasi sebetulnya memang hal yang penting dalam partai untuk menciptakan kader-kader yang berkualitas dan loyal sehingga nantinya dapat memperkuat basis partai di tengah kondisi masyarakat dengan tetap berpegang teguh dengan prinsip-prinsip yang dimiliki oleh partai.

PAN pada program sekolah politik yang di usung oleh DPW DKI Jakarta berhasil menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai partai politik untuk menyelenggarakan pendidikan politik untuk masyarakat, serta dalam program pendidikan politik PAN mendapatkan beberapa keuntungan yang dirasakan oleh internal partai amanat nasional. Keuntungan tersebut dapat terlihat dari adanya peserta pendidikan politik yang bergabung menjadi anggota partai amanat nasional

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan temuan data penelitian yang telah dikumpulkan dan dianalisis pada penelitian ini mengenai pendidikan politik pada era disrupsi pada Dewan Pengurus DPW Partai Amanat Nasional, maka dapat peneliti simpulkan sebagai berikut :

Pertama, tugas dan tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap partai politik untuk memberikan sebuah pendidikan politik kepada masyarakat dapat diimplementasikan oleh DPW Partai Amanat Nasional dengan memberikan fasilitas melalui program yang diberi nama Sekolah Politik Amanat Nasional. Dalam situasi pandemic serta keterbatasan DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta memberikan sebuah inovasi baru dengan mengkolaborasikan situasi yang ada. Program pendidikan ini dilakukan secara online dengan target audiens generasi muda. DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta menyiapkan program tidak hanya sekedar mengumpulkan generasi muda lalu diberikan sebuah orator politik, namun DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta menyatakan kesungguhan melakukan pendidikan politik dengan merangkai program secara sistematis, hal ini dapat dilihat dari rundown materi yang dimiliki oleh panitia untuk para peserta. Berdasarkan hasil data dan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti maka DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta dapat dikatakan lancar dalam menjalankan pendidikan politik di era disrupsi dengan program yang bernama Sekolah Politik Amanat Nasional dalam durasi selama 6 bulan.

Kedua, pasca program pendidikan politik para peserta dapat merasakan manfaatnya secara langsung yaitu mendapat sertifikat, mendapat ilmu pengetahuan politik maupun mendapat relasi. diterima oleh peserta berupa diantaranya hadiah giveaway yang sebelumnya sudah disediakan oleh panitia, hiburan berupa live music dari bintang tamu, sertifikat dan hiburan berupa games selama acara berlangsung. Sedangkan manfaat yang dirasakan langsung oleh para peserta antara lain berupa ilmu pengetahuan dan relasi yang didapatkan. Berdasarkan data yang didapatkan dan dianalisis oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta menjalankan sebuah strategi literasi politik dengan cara memberikan kesan baik dan memberikan fasilitas pada saat program berjalan dengan baik.

B. Kritik dan Saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi pihak – pihak terkait, diantaranya :

1. Kritik
 - a. Menjalankan program pendidikan politik tidak hanya pada situasi pandemic saja, melainkan pada situasi yang telah kondusif DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta harus mampu menjalankan program pendidikan politik. Pendidikan politik yang dikemas dalam program juga dapat lebih terarah apabila jumlah peserta yang diberikan kesempatan mengikuti tidak terlalu banyak.
 - b. Menjalankan strategi literasi politik yang dilakukan oleh DPW Partai Amanat Nasional DKI Jakarta kurang optimal, karena arah yang ingin

dituju untuk para peserta kedepannya belum begitu terlihat khususnya manfaat bagi para peserta setelah mengikuti program.

DAFTAR PUSTAKA

- Aina, Rafni, Adnan. (2015). Pengembangan Model Pendidikan Politik bagi Generasi Muda Melalui Partai Politik Guna Mengantisipasi Perilaku Golput di Kota Padang.
- Alamsyah, R. M. (2015). *Pengaruh Kampanye Hitam (Black Campaign) Pada Pemilih Pemula*, 9.
- AM, K., & M, H. (2010). *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business Horizons*, 59.
- Anwar, F. (2017). *Perubahan dan Permasalahan Media Sosial*, 138.
- Arifin, A. D. (2019). *DEMOKRASI DAN KAMPANYE HITAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (ANALISIS ATAS BLACK CAMPAIGN DAN NEGATIVE CAMPAIGN)*, 19.
- Aristino, L. (2017). Peran Partai Politik di dalam Pelaksanaan Pendidikan Politik dalam Rangka Untuk Meningkatkan Partisipasi dan Inisiatif Masyarakat dalam Proses Pemilu di Kota Semarang. 627-629.
- Ashar, A. S. (2011). *Jurnal Administrasi Negara*, 52-96.
- Ashar, A. S. (2011). Pelaksanaan Pendidikan Politik oleh DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Semarang.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) . (2020, November 09). *Jumlah Pengguna Internet di Indonesia Capai 196,7 Juta*. Retrieved Desember 08, 2020, from databoks.katadata.co.id:
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/11/11/jumlah-pengguna-internet-di-indonesia-capai-1967-juta>
- Baehaqi, D. (2014). *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Kaukaba.
- Bairizki, A. (2021). Manajemen Perubahan. *Widina Bhakti Persada*.
- Bakri, A. F. (2012). *Literasi Politik dan Konsolidasi Demokrasi*. Jakarta: Churia Press.
- Bashori, K. (2018). Pendidikan Politik di Era Disrupsi. *SUKMA: Jurnal Pendidikan*.
- Budiardjo, M. (2008). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cresswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry And Research Design: Choosing Among Five Traditions*. London: SAGE Publications.

- Datuk, A. (2020). Sistem Zonasi Sebagai Solusi Bagi Orang Tua Untuk Mendapat Pendidikan ANak yang Bermutu di Kota Kupang. *Innovative Education Journal*.
- Daud, M. D. (2019). *Partai Politik dan Pendidikan Politik* , 35 - 40.
- Daud, M. D. (2019). PENDIDIKAN POLITIK DAN PARTAI POLITIK.
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49236/1/MUHAMMAD%20DAFFA%20DAUD.FISIP.pdf>, 1.
- Dr.Gun Gun Heryanto, M. (2018). *Media Komunikasi Politik*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Echo, P. (2022). Sambut dan Jadilah Pelaku Bonus Demografi bersama UMKO. *Jurnal UMKO*.
- Efendi, R. F. (2019). Relasi Antara Pendidikan Politik dan Partisipasi Politik (Studi Kasus Terhadap Rendahnya Partisipasi Politik Pemilih di Kecamatan Waru pada Pemilihan Bupati Sidoarjo Tahun 2015). 51-64.
- Eko Handoyo, P. L. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Penerbit Pohon Cahaya.
- Fadjar, A. M. (2012). *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*. Malang: Setara Press.
- Firmanzah. (2008). *Mengelola Partai Politik: Komunikasi dan Positioning, Ideologi Politik di Era Demokrasi*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hadi, A. F., Bagus, D., & Hasan, M. (2017). *TEXT MININGPADA MEDIA SOSIAL TWITTERSTUDI KASUS: MASA TENANG PILKADA DKI 2017 PUTARAN 2*, 324.
- Handayani, G. T. (2016). Peran Tokoh Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Bagi Generasi Muda Desa Jatipurwo Kecamatan Jatipurno Kabupaten Wonogiri.
- Handoyo, E., & Lestari, P. (2017). *Pendidikan Politik*. Yogyakarta: Pohon Cahaya.
- Haris, S. (2020). *Menuju Reformasi Partai Politik* . Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- I Gede Wijaya Kusuma, I. A. (2020). Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat. *Jurnal Konstruksi Hukum*.
- Ilham, M. L. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press.
- Imanudin, N. (2020). Model Pembelajaran Cooperative Script Sebagai Upaya Meningkatkan Hasil Belajar Geografi Materi Bumi Sebagai Ruang Kehidupan. *Attractive: Innovative Education*.

- Irawan, F. Y. (2021). Analisis Penggunaan Aplikasi Zoom Sebagai Media Pembelajaran di SMA Negeri 18 Makassar.
- Kamaluddin. (2016). Pendidikan Politik Hubungannya dengan Partisipasi Politik Masyarakat desa Labuja Kecamatan Cenrana Kabupaten Maros (Analisis Terhadap Pilkada Serentak Tahun 2015). 58-67.
- Kartono, K. (2009). *Pendidikan Politik sebagai Bagian Dari Pendidikan Orang Dewasa*. Bandung.
- Kharism, D. (2015). Peran Pendidikan Politik Terhadap Partisipasi Politik Pemilih Muda. *Jurnal Politico, Vol.1 No.7*, 12.
- Moh. Mahfud, M. (1999). *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Gama mEdia.
- Nurina, A. I. (2021). Parenting for Mother's Careers for Children during Covid-19 in Islamic Education. *Bulletin of Science Education*.
- Pamungkas, A. D., & Arifin, R. (2019). *DEMOKRASI DAN KAMPANYE HITAM DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA (ANALISIS ATAS BLACK CAMPAIGN DAN NEGATIVE CAMPAIGN)*, 19.
- PAN, D. (2021). *Sejarah PAN*. Retrieved from Partai Amanat Nasional: <https://pan.or.id/sejarah-pan/>
- Prayoga, A. B. (2013). Peran Partai Politik dalam Memberikan Pendidikan Politik Kepada Masyarakat di Kabupaten Gresik (Studi Pada Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Gresik),. *E-Journal UNESA Vol.1 No.3*, 6.
- Rahim, H. (2005). *Madrasah Dalam Politik Pendidikan Indonesia*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu.
- Rahman, A. (2021). Strategi Politik Partai Amanat Nasional Dalam Menghadapi Pemilihan Anggota Legislatif Periode 2019-2024 DKI Kabupaten Pinrang. 46-69.
- Rahman, Z. (2015). Perubahan Undang - Undang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. *Jurnal Rechtsvinding Online*.
- RIzal, M. N. (2013). Menghadapi Era Disrupsi.
- Rosyid, H. (2019). Pendidikan Politik oleh DPD Partai Gerindra Jawa Timur Dalam Rangka Menghadapi Pemilu Serentak 2019 .

- Saleh, G. (2018). *Kampanye Hitam Pilgub DKI 2017: Analisis Wacana van Dijk pada Memedi Media Sosial*, 325.
- Sampe, P. L. (2016). *Ketahanan, Kemandirian, atau Kedaulatan Energi*". Media Indonesia.
- Saputro, Y. D. (2015). *Peran Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Generasi Muda dan Implikasi Terhadap Ketahanan Politik Wilayah (Studi Di DPD II Partai Golongan Karya Kota Malang Jawa Timur Tahun 2009 -2014)*, 32-42.
- Saripudin, U. (2016). FILANTROPI ISLAM DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI. *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*.
- Satmoko, D. Z. (2015). Peran Partai Politik Dalam Menerapkan Pendidikan Politik Terhadap Pengurus dan Kader Partai (Studi Pada Dewan Pengurus Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan Vol.01 No.03*.
- Sugiarto, E. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif dan R and D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriadi. (2008). *Hukum Lingkungan di Indonesia*.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.
- Sutrisman, D. (2014). *Pendidikan Politik, Persepsi, Kempemimpinan dan Mahasiswa* . Bogor: Guepedia.
- Syafri Wirman, d. I. (2003). *Merangkai Sejarah Menatap Masa Depan (Refleksi Kelahiran Partai Amanat Nasional)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Syahrudin, A. A. (2016). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pendidikan Politik Bagi Masyarakat oleh Partai Politik di Kota Makassar*.
- Wahyuningsih, S. (2013). *Metode Penelitian Studi Kasus*. Madura: UTM PRESS.
- Wanna, A. V. (2017). *Pentingnya Pendidikan Politik Generasi Muda Terhadap Pelaksanaan Partisipasi Politik di Biak Numfor*.
- Wijaya, I Gede dan Suryani. (2020). *Fungsi Partai Politik dalam Pendidikan Politik Masyarakat*.
- Wirman, S., & Nasri, I. (2003). *Merangkai Sejarah Menatap Masa Depan (Refleksi Kelahiran Partai Amanat Nasional)*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.

Yin, R. K. (1998). *Case Study Research Design and Methods*. Washington: COSMOS Corporation.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi Penelitian

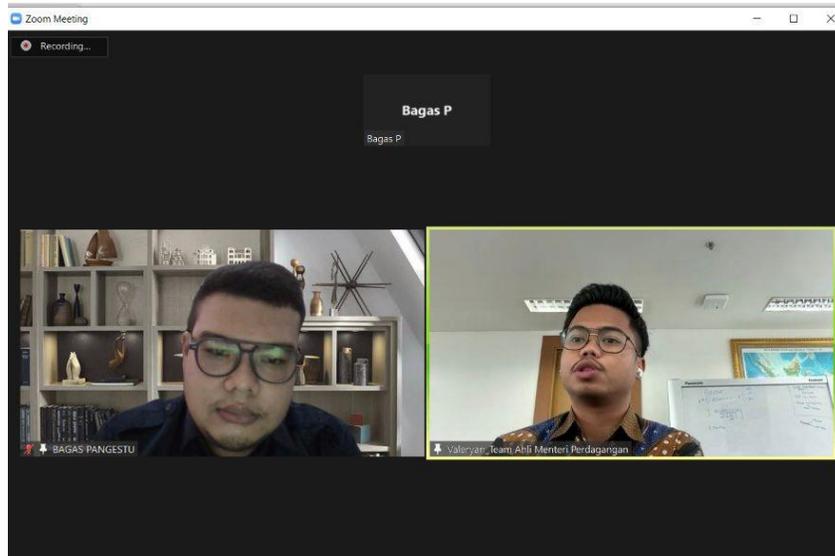
1. Dokumentasi bersama Rafli Rivandhi selaku Wakil Sekretaris DPW PAN DKI Jakarta Bidang Pendidikan



2. Dokumentasi bersama Elfriza Nicko Saputra selaku Wakil Sekretaris Bidang Pendidikan Amanat Institute



3. Dokumentasi bersama Valeryan Bramasta selaku Juru Bicara Muda DPP PAN



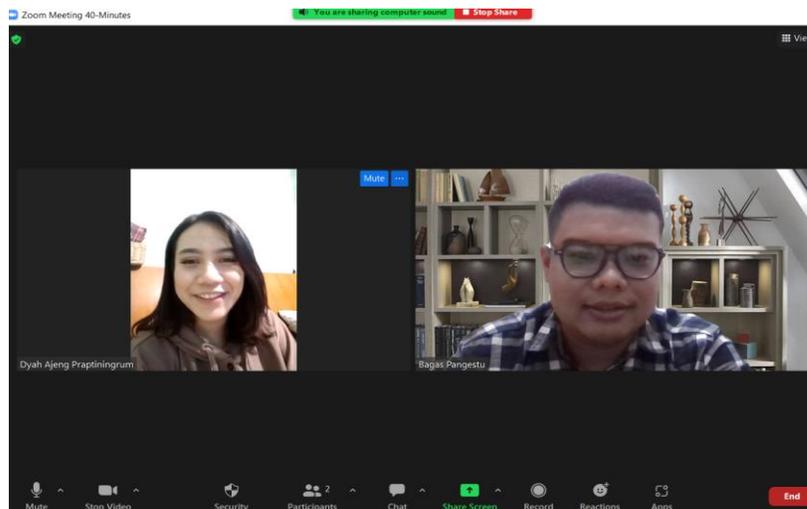
4. Dokumentasi bersama Dimas Prakoso Akbar selaku Juru Bicara Muda DPP PAN



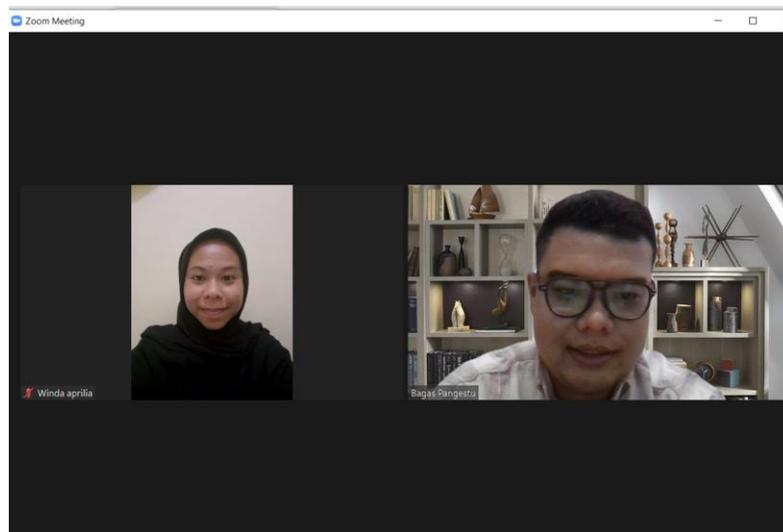
5. Dokumentasi bersama Rully Akbar selaku Kader DPW PAN DKI Jakarta



6. Dokumentasi bersama Dyah Ajeng Praptiningrum selaku Peserta Sekolah Politik Amanat Nasional.



7. Dokumentasi bersama Winda Aprilia selaku Peserta Sekolah Politik Amanat Nasional.



8. Dokumentasi bersama Ketrin Yoan Tamara selaku Peserta Sekolah Politik Amanat Nasional.

